

EKSISTENSI DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Orasi Ilmiah berjudul Eksistensi Dan Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Pertanian Dalam Pembangunan Nasional yang ditulis oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si. dan disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini bertujuan memberikan solusi bagi pengentasan berbagai problema ekonomi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam melihat pentingnya eksistensi dan revitalisasi lembaga ekonomi pertanian dalam hal ini koperasi yang berbasis pertanian dan agribisnis.

Misinya adalah pemberdayaan koperasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendekatan. Hal ini dapat dilakukan tersendiri atau secara bersama-sama, sehingga koperasi pada gilirannya mampu menjadi alat redistribusi aset produktif dan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Bangun kelembagaan koperasi ini dipandang salah satu sosok yang tepat, mengingat entitas tersebut berciri sebagai asosiasi (perkumpulan orang/petani), badan usaha dan juga sebagai suatu gerakan yang bersifat *growth from within* (untuk melawan penindasan ekonomi dan ketidakadilan sistem pasar).

Dengan sosok kelembagaan tersebut diharapkan berkembang kemampuan menangani aspek *economic of scale* dan *economies of scope* dalam sistem produksi, pengolahan, pemasaran secara keseluruhan.

Dengan kata lain, membangun pertanian dan agribisnis yang adil dan modern di perdesaan sebagai upaya pembangunan nasional berkelanjutan adalah dengan mengembangkan kelembagaan (*institutional building*), berupa koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berperan sebagai *marketing institution*, *financing institution* dan *extension institution*.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si

EKSISTENSI DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



ORASI ILMIAH

Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si

EKSISTENSI DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar
Bidang Sosial Ekonomi Pertanian
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Auditorium Kampus Utama UMSU, 05 Februari 2022



**EKSISTENSI DAN REVITALISASI
KELEMBAGAAN EKONOMI
PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL**

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

**EKSISTENSI DAN
REVITALISASI KELEMBAGAAN
EKONOMI PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL**

ORASI ILMIAH

Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si.

**Disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar
Bidang Sosial Ekonomi Pertanian
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Auditorium Kampus Utama UMSU
05 Februari 2022**



Judul

**Eksistensi Dan Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi
Pertanian Dalam Pembangunan Nasional**

Penulis

Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si.

Editor

Faiz Ahmad Sibuea, SP., M.Si.

Muhammad Arifin, M.Pd.

Desain Sampul

Fimanda Arlita, S.Pd.

Cetakan Pertama ; Februari 2022

(xii + 114 hlm); 13,5 x 20,5 cm

ISBN :

E-ISBN :

Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; umsupress@umsu.ac.id

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyyah)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____	v
PRAKATA _____	vii
MUKADDIMAH _____	ix
ORASI ILMIAH _____	1
A. Latar Belakang _____	1
B. Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan _____	4
B. Eksistensi/Keberadaan Lembaga Ekonomi Pertanian _____	10
C. Pembangunan Nasional Berbasis Pertanian	29
E. Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Pertanian Dalam Pembangunan _____	46
F. Simpulan _____	81
G. Daftar Pustaka _____	85
RIWAYAT PENULIS _____	89
UCAPAN TERIMAKASIH _____	107

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya kepada kita semuanya. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah menghantarkan umat manusia berpindah dari alam gelap gulita dan keterbelakangan ke alam yang terang benderang yang disinari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alhamdulillah rabbi 'alamin, akhirnya penulisan orasi ilmiah ini dapat dirampungkan dengan sebaik-baiknya dengan topik terkait dengan *Eksistensi dan Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Pertanian dalam Pembangunan Nasional*.

Dalam konteks pembangunan pertanian secara umum maka dikenal berbagai lembaga atau institusi yang wajib ada, jika kita menginginkan pembangunan itu berjalan dengan baik dan benar. Bahkan disebutkan oleh berbagai pakar, terdapat tiga lembaga yang wajib hukumnya mesti eksis yaitu adanya institusi atau lembaga pemasaran (*marketing institution*), lembaga keuangan (*financing institution*) dan lembaga penyuluhan (*extension institution*).

Ketiga lembaga ini biasanya berada di kawasan perdesaaan atau pertanian yang nota bene disebut sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah hidup dan bermata pencaharian di desa maka seyogyanya lembaga ini harus benar-benar diperhatikan keberadaan dan keberlangsungannya sehingga mampu menjadi solusi terbaik bagi pengentasan berbagai problema ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Semoga orasi ilmiah ini dapat memberikan pencerahan terbaik dan bermanfaat bagi semua kalangan pembaca, sekaligus menambah khazanah pemikiran tentang betapa pentingnya lembaga ekonomi desa atau pertanian dalam konteks pembangunan nasional. Wassalam.

Selamat membaca
Medan, 5 Februari 2022

Muhammad Buhari Sibuea

MUKADDIMAH

EKSISTENSI DAN REVITALISASI

KELEMBAGAAN EKONOMI

PERTANIAN DALAM

PEMBANGUNAN NASIONAL

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Yang saya hormati,

1. Bapak Ketua dan Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah I (LLDikti) Sumatera Utara.
3. Ketua, anggota senat dan guru besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan para Wakil Rektor.
5. Para Rektor dan Ketua perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Sumatera Utara.
6. Direktur Pascasarjana, Dekan dan para wakil dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ketua dan Sekretaris Jurusan dan Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Para dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Mahasiswa/i dan alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala nikmat, rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti dan hadir pada acara pengukuhan Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diselenggarakan pada hari ini.

Selanjutnya salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang taat dan patuh kepada ajarannya. Selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah pada acara pengukuhan saya sebagai **Profesor atau Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** ini dengan judul:

EKSISTENSI DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Adapun sistematika penyampaian orasi ilmiah ini akan terbagi ke dalam beberapa subpokok pembahasan atau kajian yang meliputi:

- A. Latar Belakang
- B. Eksistensi/Keberadaan Lembaga Ekonomi Pertanian
- C. Pembangunan Nasional Berbasis Pertanian
- D. Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Pertanian dalam Pembangunan
- E. Simpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Daftar Riwayat Hidup
- H. Ucapan Terima Kasih

ORASI ILMIAH

EKSISTENSI DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang pernah melanda Indonesia, disusul dengan krisis politik dan terakhir adanya krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 telah memicu tumbuhnya rasa tidak percaya diri dan dunia internasional terhadap pemerintah. Situasi itu juga diperburuk oleh krisis pangan yang seharusnya dapat diprediksi sebelumnya. Resultante interaksi dampak dari tiap kondisi yang menyimpang nampak dalam peningkatan jumlah tenaga terdidik yang menganggur, menurunnya intensitas kegiatan berbagai perusahaan dengan cepat, sampai kepada sulitnya memperoleh beberapa bahan makanan pokok serta terganggunya distribusi sembilan bahan pokok (sembako). Situasi itu telah memicu munculnya berbagai keresahan bahkan kerusuhan sebagai wujud fisik perlunya langkah penyelesaian yang justru relatif merugikan.

Dampak semua krisis ini telah menjadi beban pada gerak roda perekonomian nasional, sehingga perekonomian bangsa Indonesia mulai memasuki perekonomian yang relatif stagnan. Hal-hal seperti itu yang mendorong semua orang masuk ke dalam era reformasi yang dipercepat dengan maksud membenahi hal-hal yang tidak menguntungkan, di samping melaksanakan penyelesaian hal-hal yang masih terhambat secara lebih cepat. Proses reformasi yang sedang dilakukan pemerintah

bersama para pelaku ekonomi serta institusi lain, telah mengubah berbagai paradigma pembangunan nasional.

Gerak kegiatan yang berciri cepat dan tidak jarang menempuh jalur pintas dengan maksud menghilangkan hambatan, sekarang ini banyak ditemui sebagai wujud aplikasi proses reformasi. Ada dua hal yang dilakukan, *pertama* mereformasi berbagai pola infrastruktur politik dan prekonomian nasional yang kurang menguntungkan, dan *kedua* menangani dengan segera berbagai dampak krisis yang dirasakan oleh rakyat banyak.

Dua gerak kegiatan itu sedang dalam proses penyelarasan, karena tidak jarang keduanya justru dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Gerakan itu telah menumbuhkan gelombang pembaruan yang menuntut bangsa Indonesia untuk menyikapi kondisi tersebut dengan cermat dan strategis di samping menyiasatinya agar dapat lolos dari berbagai krisis yang masih akan berkepanjangan (Sibuea, 2011).

A. Kelembagaan Ekonomi Pertanian

Menurut Mubyarto (2016) bahwa setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang dimaksud sebagai lembaga di sini adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. Lembaga-lembaga adat yang penting dalam pertanian misalnya adalah pemilikan tanah, jual beli dan sewa-menyewa tanah, bagi hasil, gotong royong, koperasi, arisan dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini mempunyai peranan tertentu yang

diikuti dengan tertib oleh anggota-anggota masyarakat desa, di mana setiap penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat.

Lembaga-lembaga yang ada dalam sektor pertanian dan pedesaan sudah mengalami berbagai zaman. Sehingga banyak lembaga yang sudah lenyap, tetapi timbul juga lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Suatu lembaga yang hidup sekarang, ada yang merupakan suatu lembaga baru, tetapi mungkin juga merupakan suatu lembaga yang sudah mengalami perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat.

Pada hal sangat disadari bahwa aspek kelambagaan ini mempunyai peranan penting dalam pertanian dan pembangunan pertanian yaitu untuk administrasi pemerintahan, pendidikan dan penyuluhan, kegiatan gotong-royong dan lain-lain, faktor sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam pembangunan pertanian.

Salah satu lembaga ekonomi pertanian yang selama ini telah menjadi *icon* atau *brand* di tengah-tengah masyarakat adalah koperasi. Lembaga ini adalah lembaga yang sudah turun-temurun, telah mengalami berbagai perubahan atau dinamika mulai dari yang ringan sampai kepada dinamika yang luar biasa seriusnya. Betapa koperasi ini adalah merupakan sokoguru ekonomi Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 33 ayat 1 di mana dinyatakan: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Bahkan A. T. Mosher (1969) menyebutkan bahwa dalam rangka membangun struktur pedesaan yang progressif, mau tidak mau suka atau tidak suka haruslah

terdapat 3 (tiga) lembaga atau institusi yang eksis yaitu: (a) lembaga pemasaran; (b) lembaga keuangan, dan (c) lembaga penyuluhan. Berdasarkan berbagai hasil penelitian dan studi yang dilakukan oleh para pakar yang kompeten (termasuk dalam hal ini dari beberapa studi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis), seyogyanya trilogi peran kelembagaan ekonomi tersebut dapat dijalankan oleh sebuah koperasi. Artinya manifestasi dari aspek kelembagaan yang dituntut oleh Mosher dapat ditemukan di koperasi. Sehingga amatlah benar bilamana salah seorang *the founding father* kita Dr. Mohammad Hatta dinobatkan sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" karena kegigihan dan komitmennya yang luar biasa dalam upaya menjadikan koperasi sebagai pengejawantahan lembaga ekonomi rakyat yang tahan banting dalam menghadapi segala situasi dan zaman ke depannya.

Seterusnya dalam pidato ilmiah ini yang disebutkan sebagai manifestasi dari lembaga ekonomi pertanian adalah koperasi yang berbasis pertanian atau agribisnis. Biasanya koperasi ini mempunyai wilayah unit usaha (disebut juga Wilud) di pedesaan sehingga paling akrab jika dinyatakan bahwa Koperasi Unit Desa adalah bentuk terpopuler dari eksistensi koperasi di tengah-tengah masyarakat.

B. Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan

Dewasa ini terdapat berbagai lembaga perekonomian yang bergerak di berbagai sektor kehidupan. Namun, sangat sedikit lembaga perekonomian yang mampu bergerak dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan, betapa beruntungnya Indonesia yang memiliki sebuah lembaga perekonomian resmi yang bertujuan untuk kepentingan bersama yaitu koperasi. Pengertian dari koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "*co*" artinya bersama, dan "*operation*" artinya bekerja.

Jadi, koperasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama dengan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia sudah terjamin keberadaannya dengan adanya Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*". Selain tercantum dalam UUD 1945, koperasi juga memiliki peraturan khusus di dalam penyelenggaraannya yaitu UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (G. Kartasapoetra dkk, 1991).

Terbentuknya koperasi di Indonesia diawali oleh keinginan rakyat untuk bebas dari kemiskinan pada masa penjajahan Belanda. Berbagai upaya telah dilakukan yaitu diawali dari tahun 1908, rakyat Indonesia membuat gerakan-gerakan untuk mengupayakan perluasan pergerakan koperasi demi kesejahteraan rakyat. Terlepas dari usaha rakyat Indonesia, para penjajah tidak ada hentinya melakukan pergolakan dengan mengeluarkan peraturan yang mempersulit rakyat Indonesia dalam menjalankan perkoperasian.

Namun, para pemuda dan tokoh bangsa Indonesia mengajukan keberatan atas peraturan tersebut dan membentuk komisi yang membuat Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih mempermudah rakyat Indonesia dalam menjalankan perkoperasian. Kemudian terbitlah Peraturan UU No. 25 tahun 1992 yang isinya adalah lebih membantu perkembangan koperasi untuk tumbuh dengan sangat pesat. Setelah Indonesia merdeka, para penggerak koperasi di Indonesia mengadakan Kongres I Koperasi pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Berselang cukup lama dari kongres yang pertama pada 15 - 17 Juli tahun 1953 dilaksanakan Kongres 2 Koperasi. Pada kongres tersebut terdapat beberapa butir yang dihasilkan, seperti: tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi, asas koperasi adalah

kekeluargaan, dan ditetapkannya bapak koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta (G. Kartasapoetra dkk, 1991).

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat berbagai jenis koperasi yang membantu perekonomian Indonesia di antaranya koperasi yang berdasarkan atas fungsinya, tingkat dan luas daerah kerja, dan status keanggotaannya. Pada tahun 2017 tercatat Indonesia memiliki 152.282 unit koperasi. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya yang paling banyak di Indonesia yaitu koperasi konsumsi sebanyak 97.931 unit. Oleh karenanya jelas terlihat bahwa koperasi yang bergerak di dunia pertanian sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor non pertanian. Namun, di balik jumlah yang melimpah, kontribusi koperasi untuk pembangunan, khususnya produk domestik bruto (PDB) masih dikatakan kecil yaitu sebesar 4%. Seperti yang diketahui, koperasi merupakan *soko guru* (penyangga utama) perekonomian Indonesia, di mana keberadaannya diharapkan mampu membantu kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya koperasi mengalami penurunan performa akibat berbagai permasalahan yang terjadi, beberapa permasalahan itu terdapat pada: kualitas sumber daya manusia, modal, manajerial, dan rendahnya kesadaran anggota koperasi. Dilihat dari peran koperasi yang sangat penting yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan khususnya produk domestik bruto (PDB), maka diperlukan adanya perhatian khusus demi perekonomian Indonesia yang sejahtera (Sibuea et. al., 2021)

Apa pengertian ekonomi rakyat itu? Berdasarkan UUD 1945 ekonomi rakyat identik dengan koperasi, yaitu kumpulan orang-orang (anggota-anggota koperasi) yang memiliki kegiatan usaha ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Mereka harus mampu berperan bukan saja sebagai pemilik organisasi, melainkan secara efektif dan konsisten juga sebagai pengguna produk atau jasa dari

koperasinya. Itu berarti secara rasional ada tuntutan tentang manfaat yang ingin diraih dari organisasi yang dibentuk. Sementara itu, pertumbuhan dan penyebaran koperasi selama ini telah menunjukkan hasil prestasi yang relatif cukup mantap baik di tingkat mikro maupun makro.

Selama 70 tahun lebih pembangunan bangsa, permasalahan yang patut dikecewakan ialah ternyata misi pembangunan koperasi masih belum lagi mampu menyentuh landasan pikiran maupun harapan *the founding father*, yang telah merumuskan UUD 1945. Itu berarti diperlukan adanya reorientasi pada pembangunan misi koperasi, khususnya dalam upaya pemberdayaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Dalam kurun waktu pembangunan masa lalu, praktis pertumbuhan koperasi seolah-olah terkait erat dengan gerak dan dinamika program pemerintah. Hal itu terjadi karena koperasi telah diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah, terutama untuk mendukung aplikasi program-program kebijakan pemerintah dan khususnya di sektor pertanian.

Sementara itu, program pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan negara industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat justru telah mengendurkan pembinaan kegiatan sektor pertanian bersangkutan, yang diposisikan sebagai tulang punggung pembangunan. Terjadi hal yang paradoks di lapangan yang menjadi ironi dan kondisi objektif dalam pengembangan institusi koperasi ini.

Akibat dari semua itu, koperasi-koperasi menjadi tidak mampu mengembangkan diri, karena dengan berkuat di posisi *on farm*, maka penanganan berbagai masalah hanya memberikan insentif yang kecil atau bahkan boleh jadi tidak dapat memperoleh apa-apa atau tidak dapat melakukan apa-apa. Hal itu juga sekaligus membuktikan bahwa konsep *trickledown effect* yang

diharapkan dapat meneteskan hasil-hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat kecil, karena adanya perubahan kondisi lingkungan strategis, telah menyebabkan tumbuhnya kesulitan tersendiri. Akibatnya fenomena pembangunan yang adil yang diharapkan terjadi di lapangan ternyata gagal dibuktikan. Bahkan dampaknya adalah kesenjangan yang semakin nyata sehingga menjadi alasan lain untuk memunculkan proses reformasi. Untuk itulah diperlukan reorientasi dalam misi pemberdayaan koperasi yang dapat menempatkannya pada peran sebagai lembaga ekonomi rakyat yang efektif dan efisien (Sibuea, 2011).

Perubahan reorientasi misi mencakup pengertian agar misi tersebut mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi menjadi wahana penggerak roda-roda ekonomi bangsa dimulai pada tingkat perekonomian domestik yang selanjutnya berdampak pada terdukungnya kekuatan perekonomian nasional. Di sisi lain, misi pemberdayaan koperasi juga harus mencakup pemahaman bahwa dalam lingkup pengertian sebagai suatu badan usaha, koperasi perlu berakar pada kehidupan perekonomian rakyat. Upaya membangun hal itu diakui tidak mudah, karena pelaksanaan programnya relatif cukup kompleks. Untuk itulah langkah-langkah yang akan dilakukan tidak lain dimaksudkan untuk dapat memberikan makna kerakyatan, kemartabatan dan mewujudkan berbagai inovasi untuk membangun kemandirian organisasi. Langkah menangani hal itu lingkupnya benar-benar memerlukan kesabaran, ketekunan dan keuletan tersendiri.

Keberhasilan penerapan misi pembangunan hanya akan dapat diraih apabila programnya terkait erat dengan strategi pembangunan bangsa. Karena itu, program pembangunan koperasi mau tidak mau dan suka tidak suka harus didukung oleh berbagai kebijakan dan program

pembangunan perekonomian nasional. Melalui proses itulah kemudian dilakukan penggarapan yang menyentuh tatanan dasar kehidupan ekonomi rakyat. Sampai saat ini, koperasi belum sempat menikmati fasilitas berlebih seperti yang dinikmati oleh pelaku ekonomi lain. Namun pada sejumlah koperasi yang telah memiliki ketahanan ekonomi pada saat ini, dapat dibuka peluang seluas-luasnya untuk menangani bidang-bidang usaha di sektor pangan, sandang dan papan secara utuh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, serta harus tetap terkait erat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Urutan ini menunjukkan bahwa reorientasi misi koperasi secara menyeluruh memang relevan untuk dilakukan.

Misi pemberdayaan koperasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pendekatan yang digunakan oleh koperasi dapat dilakukan tersendiri atau secara bersama-sama, sehingga koperasi pada gilirannya mampu menjadi alat redistribusi aset produktif dan nilai tambah produk yang dihasilkan. Melalui pola seperti itu maka konsekuensinya akan ditemukan berbagai koperasi primer spesialis yang diharapkan akan lebih mampu menangani komoditi tertentu dengan lebih efektif dan efisien, sehingga bukan hanya ada satu KUD (Koperasi Unit Desa) saja sebagai koperasi tunggal yang ada dalam satu desa, akan tetapi tidak berarti KUD harus dibubarkan, tetapi prinsipnya adalah memberi peluang untuk menampung pembentukan koperasi yang baru sepanjang layak secara ekonomi dan diperlukan oleh anggota. Dengan demikian nantinya akan dijumpai bangunan-bangunan koperasi primer sebagai penjelmaan kekuatan ekonomi rakyat yang dapat membangun kekuatan kehidupan perekonomian domestik. Pelaksanaan program pemberdayaan koperasi tidak akan dilakukan secara sporadis dan marjinal. Untuk itulah melalui aplikasi program-program yang realistik,

diharapkan akan ditemukan perbaikan yang substansial dan mampu menampilkan makna kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian koperasi serta tingkat pertumbuhan dan bisnis yang didasarkan pada prinsip kesetaraan (Sibuea, 2011).

C. Eksistensi/Keberadaan Lembaga Ekonomi Pertanian

Koperasi merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maka tersirat suatu harapan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. Koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Koperasi yang merupakan gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat merupakan organisasi swadaya masyarakat

yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan, serta kegiatan pelaksanaannya (Ninik Widyanti, 1991).

Dalam upaya membangun koperasi, stakeholder hendaknya memberi prioritas untuk membina dan mengembangkan koperasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Koperasi merupakan sektor yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu program pembinaan dan pengembangannya senantiasa harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Eksistensi koperasi secara kuantitas cukup menggembirakan namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian serius. Berbagai permasalahan koperasi yang menjadi hambatan berkembangnya koperasi perlu diidentifikasi dan dicarikan alternatif solusinya. Sehingga harapan ke depan, koperasi mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Masing masing koperasi, memiliki karakteristik dan permasalahan sendiri-sendiri. Perbedaan karakteristik yang ada merupakan kearifan lokal koperasi yang perlu mendapatkan perhatian secara arif dan bijaksana pula. Berikut beberapa permasalahan yang ada di koperasi masa kini (Ghofirin, 2021):

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengurus dan Pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan koperasi tidak dapat terwujud dengan baik. Pendidikan perkoperasian yang ada selama ini, baik yang

diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Dewan Koperasi, Pusat Koperasi dan Primer Koperasi secara mandiri, belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajarannya.

2. Keberpihakan stakeholder

Koperasi di era sekarang dituntut untuk mandiri dan berdaya saing. Hal ini mengakibatkan stakeholder merasa harus memaksa agar koperasi dalam wilayah binaannya lepas dan tidak lagi memiliki hubungan saling ketergantungan. Akibatnya, beberapa koperasi fungsional tidak mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi ketika akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan, bahkan beberapa koperasi terpaksa keluar dari lingkungan instansi/lembaganya disebabkan tidak mampu membayar sewa. Bahasa yang sering muncul adalah tidak boleh ada badan hukum di dalam badan hukum.

3. Sistem Monitoring Kelembagaan

Di era millennial saat ini dirasakan oleh gerakan koperasi bahwa peran pemerintah dalam melayani dan mengawasi kelembagaan koperasi masih berbasis secara konvensional. Di beberapa kasus terjadi, koperasi yang kehilangan akta pendirian dan akta badan hukum Koperasi, mengalami kesulitan ketika mengurus salinan ke dinas koperasi. Walaupun koperasi yang bersangkutan sudah mengurus surat kehilangan dari kepolisian. Sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan digitalisasi data, dengan cara meng-*scan* data yang ada di dinas koperasi. Merubah data berbasis kertas, menjadi data digital. Sehingga ketika membutuhkan data, akan mudah dan cepat dalam pencarian.

Kondisi terkini bahwa pembangunan koperasi di Indonesia cukup mengalami kemajuan yang signifikan, jika diukur dengan jumlah unit usaha koperasi, jumlah

anggota, aktiva dan volume usaha. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pertumbuhan jumlah koperasi meningkat, dengan angka pertumbuhan koperasi aktif rata-rata sebesar 2,5% pada periode 2012 hingga 2016. Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi. Sementara itu jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi.

Dilihat dari dasar hukum dalam Undang-Undang 1945, koperasi memperoleh hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Pembangunan koperasi adalah suatu proses yang harus berkelanjutan dan tersistem di mana dalam mempraktikkannya menggunakan prinsip-prinsip koperasi, yaitu garis-garis penuntun yang digunakan oleh anggota koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktiknya seperti: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerja sama di antara koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Koperasi yang sudah dibangun jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992).

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan juga diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat, karena jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, sulit mewujudkan reformasi

yang sesungguhnya, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata.

Bila sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya, mereka harus diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan serta adanya pemberian insentif dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan memahami jati diri dan menerapkannya. Di sinilah peranan pihak ketiga termasuk pemerintah untuk dapat membangun mereka mencapai tujuannya baik sebagai mediator, fasilitator maupun sebagai koordinator. Dengan demikian pembangunan koperasi perlu diteruskan, karena pembangunan adalah proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan, berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang semakin banyak (Noer Soetrisno, 2001).

Perkembangan koperasi secara nasional di masa mendatang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dari segi kuantitas, tetapi masih lemah dari segi kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jati diri koperasi yang mandiri. Hanya koperasi yang melaksanakan garis-garis penuntun koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa yang akan datang dapat dilihat dari banyaknya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah manajer, jumlah modal, volume usaha, dan besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang telah dihimpun koperasi, sangat prospektif untuk dikembangkan. Pemberdayaan koperasi itu perlu didukung dengan adanya sistem pendidikan yang terorganisir dan harus dilaksanakan secara konsisten untuk mengembangkan organisasi, usaha, dan mampu

bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya berbagai pemberdayaan di atas dan didukung oleh kelebihan yang dimiliki oleh koperasi sendiri, hal ini sangat meyakinkan bahwa koperasi akan mampu berkembang dan menunjukkan peningkatan dimasa mendatang.

Menurut Dulfer (1979) ada beberapa kelebihan yang dimiliki koperasi antara lain: Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi, jadi laba/sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.

Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Anggota koperasi harus berperan ganda yaitu aktif dalam menyimpan dana koperasi dan melakukan pinjaman kepada koperasi.

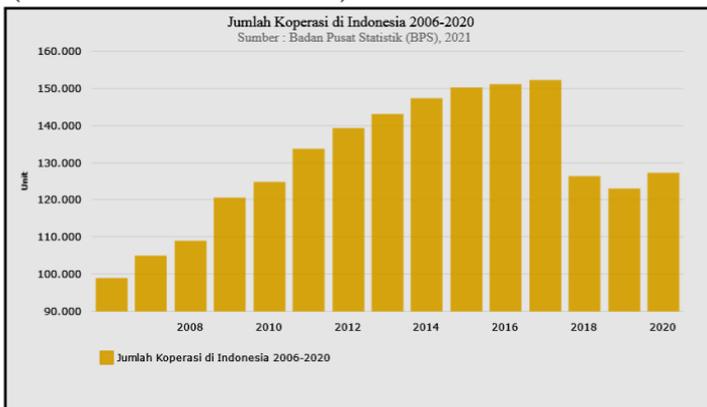
Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Maksudnya adalah seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa melainkan keinginannya sendiri untuk memperbaiki perekonomiannya

Mengutamakan kepentingan anggota. Koperasi menitikberatkan untuk kepentingan anggota bukan individu, karena koperasi memiliki asas kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

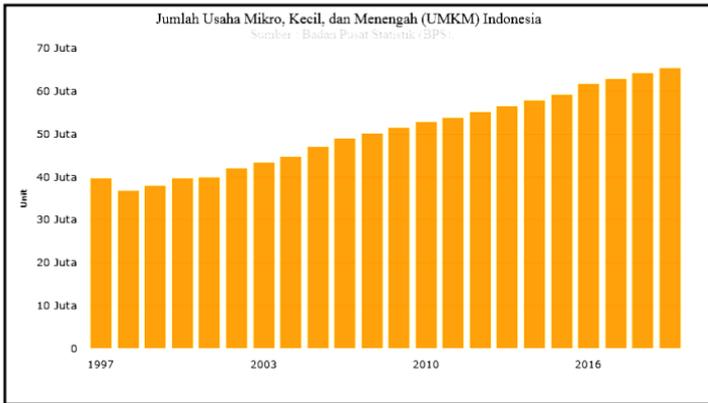
Keberadaan koperasi tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di negara lain juga mengembangkannya, seperti: koperasi konsumen di Singapura, Jepang, Kanada, dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut. Koperasi kredit di Amerika Serikat memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk memantau kepemilikan saham maupun menyalurkan gaji karyawan (Md. Ruhul Amin et.al., 2014).

Melihat kemajuan koperasi di negara lain, kemajuan koperasi di Indonesia juga sudah banyak yang berhasil, seperti: GKBI yang bergerak di bidang usaha batik, Kopti yang bergerak di bidang usaha tahu dan tempe, serta KOSUDGAMA koperasi yang berbasis di perguruan tinggi dan KUD pada era pemerintahan Orde Baru mampu menjaga kestabilan komoditi beras. Nilai lebih yang dimiliki oleh koperasi itulah yang membuat koperasi mampu dijadikan solusi dalam membantu perekonomian masyarakat, sehingga pengembangan koperasi menjadi lebih baik lagi perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan manfaat lebih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Noer Sutrisno, 2001).

Berikut data statistik Koperasi Indonesia selama 15 tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam tabel berikut (Badan Pusat Statistik, 2020):



Jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.124 unit pada 2020. Jumlah ini naik 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah koperasi terbanyak berada di Jawa Timur yakni sebanyak 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari total koperasi. Selanjutnya, Jawa Barat dengan dengan 14.706 unit dan Jawa Tengah sebanyak 12.190 unit. Adapun jumlah koperasi di Indonesia sempat mencapai angka tertinggi selama 15 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 152.174 unit pada 2017. Namun, jumlahnya menurun cukup drastis pada 2018 yakni menjadi 126.343 unit. Begitu pula pada tahun berikutnya yang kembali menurun hingga menjadi 123.048 unit. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan sektor koperasi bisa berkontribusi 5,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2024. Saat ini, kontribusi koperasi baru 5% dari PDB.



Tabel 2: Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia

Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil. Sementara, ada 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Adapun, jumlah UMKM tersebut setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sementara, usaha besar hanya mencapai 0,01% dari total unit usaha di dalam negeri. UMKM juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya yang sebesar 116,9 juta orang. Kemudian, UMKM menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi UMKM mencapai 57,14%. Sementara, ekspor nonmigas yang berasal dari UMKM mencapai 339,2 triliun pada 2019. Jumlah itu mencapai 15,65% dari total ekspor Indonesia pada dua tahun lalu.

1. **Penyebab Redupnya Lembaga Ekonomi (koperasi)**

Dalam upaya untuk mengembangkan koperasi, koperasi dihadapkan pada keadaan di mana masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, beberapa kendala ini menjadi kekurangan koperasi di antaranya yaitu (Sibuea, 2018):

- a. Keterbatasan di bidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan.
- b. Daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan badan usaha tersebut.
- c. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi.
- d. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan lancar. Mereka yang dipilih untuk menjadi pengurus koperasi seringkali hanya mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat, tanpa melihat kemampuannya.
- e. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Terdapat banyak keluhan mengenai

pengenaan pajak terhadap koperasi, di antaranya: pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar/tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No.46 Tahun 2013, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari Rp240.000 juga memberatkan anggota koperasi, dimana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah, tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama sebagai lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai Rp 2 miliar.

Kekurangan yang dimiliki oleh koperasi di atas memperlihatkan koperasi kurang mendapat perhatian karena kurangnya memperlihatkan kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya. Keadaan ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan koperasi. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian di Indonesia.

Menurut Hainim Kadir dan Yusbar Yusuf (2020) bahwa koperasi sebagai lembaga ekonomi pertanian atau desa merupakan sokoguru bagi perekonomian daerah yang merupakan lembaga ekonomi di samping badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Dalam perekonomian masing-masing mempunyai kontribusi sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam perkembangannya di Indonesia koperasi belum dapat memberikan kontribusi berarti. Malahan ada pernyataan yang keras mengatakan bahwa Indonesia telah gagal dalam melakukan pembangunan koperasi. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi karena, pertama; konstitusi Indonesia UUD 1945 memberikan

dasar dan dukungan hukum, politik maupun kebijakan pembangunan dan kedua; adanya komitmen yang kuat dari pemerintah selama ini dalam berbagai program pembangunan yang mendorong tumbuh kembangnya koperasi.

Mengapa gagal membangun koperasi yang kuat? Banyak polemik tentang hal ini. Akan tetap dari polemik-polemik tersebut dapat disimpulkan mengapa gagal membangun koperasi yang kuat, pertama; karena tidak atau kurang dipahami makna sebenarnya dari koperasi sebagai mana dalam jatidiri koperasi tentang batasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Kekurangan pemahaman ini membuat koperasi salah bentuk, keliru memahami manajemennya dan kehilangan sifat sebagai organisasi yang berbasiskan anggota-anggota (orang) dan kedua; umumnya membangun koperasi atas dasar pendekatan makro, politis, dan sering berputar-putar pada tatanan wacana (Ibnoe Soedjono, 2003).

Sebab-sebab kegagalan membangun koperasi yang dikemukakan di atas, juga dilengkapi oleh kondisi eksternal atau aspek-aspek di luar perkoperasian. Ke depan bagaimana mengatasi permasalahan koperasi secara proporsional dari permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus dijawab. Untuk itu bagaimana membangun koperasi sesuai dengan prinsip, nilai dan identitas koperasi merupakan langkah strategis awal yang penting untuk dilakukan.

2. Prinsip dan Nilai Koperasi

Dipahami bahwa koperasi mempunyai dua sisi yang sebenarnya bisa sejalan yaitu perkumpulan dan perusahaan. Akan tetapi sering dilihat sebagai perkumpulan dipahami koperasi adalah lembaga sosial. Sebaliknya sebagai perusahaan dipahami adalah suatu badan usaha yang dikendalikan oleh modal untuk mencari

keuntungan. Akibat dari persepsi yang demikian, banyak koperasi yang dibangun sebagai suatu "hybrida" yang memiliki ciri-ciri koperasi tertentu, akan tetapi pola berfikir dan tindakannya sulit dibedakan dari sebuah korporasi yang berbasiskan modal.

Sebagai wahana usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara bersama-sama, koperasi merupakan suatu badan yang mempunyai ciri sendiri. Koperasi adalah sebuah organisasi yang merupakan gerakan bersama untuk menolong diri sendiri dan bertumpuh pada kekuatan bersama. Meskipun demikian koperasi tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata.

Terkait itu koperasi mempunyai tiga aspek utama, yaitu (1) ekonomi (2) moral dan (3) bisnis. Namun jika diamati lebih jauh ketiga aspek ini merupakan sumber kekuatan utama untuk mengikat kerja sama anggota dalam koperasi dan sekaligus dapat memberikan rangsangan atau dorongan kepada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat (Noer Soetrisno, 2001).

Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai ciri yang pemilikan dan pelanggannya adalah sama. Prinsip ini oleh Munkner disebut sebagai suatu prinsip identitas (Munkner, 1980). Aspek ini begitu pentingnya dalam kehidupan sebuah koperasi, karena tanpa prinsip pemilikan-pelanggan tersebut koperasi akan kehilangan ciri dan identitasnya. Peningkaran terhadap prinsip ini juga akan melahirkan orientasi mencari keuntungan semata dan melupakan pengembangan dan terkaitan dengan para anggota yang memiliki kepentingan untuk dilayani oleh koperasi. Prinsip identitas ini sebenarnya menjadi ciri utama koperasi serta harus dipertahankan oleh koperasi melalui upaya khusus dengan memberi nilai yang kuat agar prinsip ini dapat dipertahankan. Prinsip identitas sangat penting walaupun banyak lagi prinsip-prinsip lain

yang menjadi ciri-ciri koperasi. Pandangan tentang prinsip koperasi di atas sengaja ditekankan di sini karena dalam sejarahnya ketika berbagai bentuk koperasi perintis didirikan diberbagai negara seperti Inggris, Jerman Barat, Prancis, Denmark dan negara lainnya, justru identitas itulah yang ditekankan terlebih dahulu. Baru ketika mereka ingin menjadikan sebagai suatu gerakan yang besar, maka nilai-nilai dasar tersebut tidak lagi dominan mewarnai koperasi. Dalam perkembangannya nilai-nilai tersebut juga tumbuh secara bervariasi mengikuti perkembangan dan kesepakatan bersama.

Adalah melalui ICA (1995) kemudian dirumuskan apa yang menjadi nilai dasar inti bagi gerakan koperasi di dunia. Kongres ICA di Stockholm pada tahun 1988 telah menyepakati empat nilai dasar utama yaitu:

- 1) Demokrasi (*democracy*), prinsip ini menekankan pada keputusan-keputusan koperasi diambil secara bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan dari luar koperasi. Di dalam koperasi dianut dasar penegakan demokrasi melalui ciri pemungutan suara satu orang satu suara dalam koperasi primer dan proporsional dengan jumlah pada koperasi sekunder serta anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Partisipasi (*participation*), wujud nyata prinsip ini dapat berupa pemenuhan kewajiban dalam penyerahan modal koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, simpanan-simpanan kegiatan usaha dan lain-lain.
- 3) Kejujuran (*honesty*), maknanya para penyelenggara koperasi mencerminkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam aspek lainnya.

- 4) Kepedulian (*caring*), prinsip ini memberikan ciri khusus kepada koperasi sebagai organisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas disekitar wilayah kerjanya.

Keempat nilai dasar tersebut telah menjadi pedoman dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh para anggota dan dikelola secara bersama oleh mereka dan didukung oleh para anggotanya. Keempat nilai tersebut secara implisit dapat menjadi pengikat non-ekonomis dalam menjamin proses usaha koperasi yang pada akhirnya akan dapat menegakkan identitas koperasi.

Dalam kenyataannya nilai dasar tersebut juga dapat bervariasi dari suatu koperasi atau negara ke yang lainnya. Hal ini secara umum dapat dilihat dari perbedaan mazhab (paham) yang dianutnya. Pada mazhab yang menekankan pada fungsi koperasi sebagai suatu upaya untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar, maka unsur demokrasi dan berpartisipasi menjadi elemen menonjol. Karena kedua nilai itulah yang menjadi elemen dasar untuk mengembangkan kekuatan koperasi dan merupakan dasar utama untuk menunjukkan kekuatan kerja sama pasar bagi para anggotanya (Nasution, 1990).

Sementara pada kelompok penganut mazhab persemakmuran akan cenderung melihat keadilan sosial sebagai elemen pentingnya. Karena dengan nilai tersebut tujuan untuk mengembangkan sistem koperasi dan negara kesejahteraan akan secara mudah diwujudkan. Terlepas dari adanya perbedaan di atas memang nampaknya demokrasi adalah elemen universal bagi suatu koperasi yang sehat dan kompetitif. Kemampuan kompetitif ini menjadi dasar kehadiran koperasi sebagai tolak ukur pasar yang ditunjukkan pada upaya korektif secara bersama oleh masyarakat.

Dalam suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan efisiensi memang menjadi dasar penting atau prasyarat untuk mewujudkan suatu keadilan, karena hanya dengan suatu sistem produksi dan distribusi yang efisien kita akan dapat melahirkan kewajaran pemberian imbalan jasa untuk menuju keadilan yang lebih baik. Demokrasi adalah nilai dasar yang penting dan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara sadar sesuai dengan kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap informasi yang disediakan oleh pasar.

3. Identitas Koperasi

Telah dikemukakan bahwa identitas adalah merupakan prinsip yang paling dasar bagi hadirnya sebuah koperasi yang mandiri, efektif dan efisien. Karena itu identitas harus dijadikan modal dan faktor penentu menuju suksesnya koperasi. Di negara berkembang banyak koperasi maju dan dapat berkembang tanpa harus terhimpit dengan arah kadar kekentalan identitas tersebut. Karena sejak awal koperasi dikembangkan melalui mekanisme intervensi negara. Oleh sebab itu keberhasilan bisnisnya tidak terlalu beriringan dengan kadar kemandiriannya.

Prinsip identitas merupakan sumber kekuatan koperasi. Namun prinsip identitas juga dapat menjadi kekangan bagi koperasi itu sendiri. Hal ini terjadi jika koperasi telah tumbuh menjadi besar dan melampaui kebutuhan anggotanya. Suatu koperasi yang berhasil mengembangkan dirinya dan mengangkat taraf hidup anggotanya akan menjadi tidak ekonomis lagi bila hanya bertumpu pada layanan bagi anggotanya saja, sehingga identitas pemilik-pelanggan hanya bersifat sepihak saja. Dalam hal ini anggota akan tetap dapat memenuhi tuntutan untuk loyal kepada koperasi sebagai pelaksanaan prinsip identitas. Tetapi demi efisiensi koperasi harus

mengembangkan keluar anggotanya guna memanfaatkan kelebihan kapasitasnya. Dengan jalan ini diharapkan koperasi tidak mengabaikan prinsip identitasnya (Muhammad Hatta, 1985).

Kecepatan suatu koperasi mencapai tahapan ini akan sangat tergantung pada batasan keanggotaannya yang diberlakukan oleh koperasi atau ketentuan undang-undang perkoperasian suatu negara. Semakin kecil lingkup batasan kelompok keanggotaannya semakin cepat kondisi semacam itu dihadapi koperasi.

Gambaran di atas merupakan faktor kemajuan internal yang demi alasan efisiensi dan daya saing telah menjadikan koperasi untuk tidak sepenuhnya tunduk pada identitasnya sendiri. Di samping itu masih ada faktor internal lainnya, jika misi koperasi untuk mengkoreksi kegagalan mekanisme pasar telah selesai dan layanan pasar telah efisien. Dengan kondisi seperti itu dapat saja identitas tersebut tidak dipatuhi anggota, dan koperasi hanya mempunyai fungsi yang sifatnya *intangibile*.

Di samping itu juga sangat mungkin kekentalan identitas akan kendor karena adanya perubahan teknologi yang mampu memecahkan masalah indivisibility dari mesin-mesin atau investasi. Apalagi dalam perkembangan sekarang yang telah banyak teknologi yang layak dimanfaatkan untuk skala rumah tangga bahkan personal. Perkembangan yang bersifat eksternal ini akan makin mempersempit pengelolaan bersama dan meningkatkan kompetisi yang semakin tajam. Keadaan ini akhirnya mengancam koperasi untuk memecahkan kehematan dari adanya skala yang lebih besar.

Faktor eksternal lainnya yang dapat melonggarkan kekentalan identitas adalah perubahan struktur pasar yang mampu menghilangkan hambatan struktural. Misalnya jaringan informasi yang semakin tertata telah mendekatkan

sumber-sumber produksi dan jalur distribusi barang yang semakin pendek.

Koperasi di negara-negara maju merespon fenomena perubahan itu dengan aktif. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan instrumen baru untuk mengikat anggota tetap dalam jaringan layanannya. Model yang dapat dijadikan contoh adalah model *direct charge cooperative* yang banyak dikembangkan di Kanada. Pada dasarnya model ini bersifat netral karena perinsip tersebut hanya mungkin dikembangkan dengan adanya pelopor atau warisan sukses koperasi sebelumnya. Karena koperasi tidak lagi diprakarsai dan dimodali oleh para anggotanya, tetapi hanya pemeliharaan untuk kelangsungannya saja yang dijaga dengan mekanisme koperasi (Sabrina Engert, et.al., 2016).

Berbagai gambaran dan pengalaman empiris di atas memperlihatkan bahwa prinsip identitas tidak selalu implisit dalam setiap koperasi, tetapi akan berkembang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal koperasi. Prinsip identitas juga dapat dijaga dengan suatu inovasi baru baik di bidang teknologi atau membangun ketergantungan lainnya. Jika prinsip identitas dapat bergeser, maka tentunya nilai yang menjadi dasar untuk mempertahankannya juga dapat berkembang memenuhi tuntutan kemajuan organisasi dan lingkungan.

Nilai dasar koperasi dapat tererosi bukan saja oleh faktor yang telah diuraikan di muka, tetapi dapat terjadi karena dampak negatif dari adanya campur tangan pemerintah. Nilai yang rawan terhadap intervensi berlebihan adalah nilai kemandirian dan demokrasi, karena sangat sering bantuan pemerintah diikuti dengan pengawasan dan pengaturan yang berlebihan sehingga mengekang dan melahirkan ketergantungan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan erosi terhadap nilai dasar koperasi.

Pemerintah sebenarnya menyadari akan hal ini tetapi seringkali, tidak tahu jalan keluarnya atau bahkan cukup banyak yang terjebak dalam pandangan untuk menyelamatkan lembaga koperasinya ketimbang mengamankan tujuan dikembangkannya mekanisme koperasi. Penyakit inilah yang akhirnya menimbulkan ketergantungan berkepanjangan dan menyeret koperasi menjadi beban bukan alat perjuangan anggota.

Untuk mengatasi penyakit itu tidak ada lain kecuali mengembalikan koperasi untuk sepenuhnya dapat berpegang pada nilai dasarnya terutama yang menyangkut otonomi dan demokrasi. Tanpa dikembalikannya nilai dasar tersebut selamanya koperasi akan kering dan tidak akan mampu menghasilkan koperasi yang dapat berpegang kuat pada prinsip identitas yang menjadi sumber kekuatannya.

Globalisasi sebagai perkembangan baru memang akan membuka dimensi baru yang mengarah kepada saling ketergantungan dan semakin ditaatinya prinsip-prinsip persaingan sehat. Dalam situasi yang demikian kelangsungan suatu usaha maupun pembangunan ekonomi suatu negara akan sangat tergantung pada kemampuan menciptakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan tidak lagi terbatas pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang diperoleh karena hadiah dari alam (Baswir, 2000).

Dalam penciptaan keunggulan kompetitif unsur efisiensi menjadi semakin menonjol. Karena itu koperasi yang dari semula dikembangkan dalam mekanisme pasar tidak akan mengalami persoalan yang berarti. Ia akan tetap dapat bersaing dan menjalankan usahanya. Bahkan baginya hal itu telah melahirkan kesempatan baru untuk membuka *cooptrade*, secara lebih luas baik dengan sesama koperasi maupun non koperasi. Hal ini dapat terjadi karena nilai dasar koperasi telah digunakan secara tepat sejak awal

membangun landasan bagi perkembangannya, dan setiap tantangan baru dijawab dengan merespon pasar sesuai tuntutannya.

Di negara berkembang mungkin mengalami pengalaman yang beraneka ragam. Karena perkembangan koperasi yang lepas dari kontrol pasar menimbulkan ketergantungan berkelanjutan baik sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan khusus untuk perlindungan bagi koperasi. Sehingga sering dijumpai koperasi tanpa prinsip identitas dan secara bisnis tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam mekanisme pasar yang sehat (Roepke, 1992).

Dalam merespon pengalaman ini sebenarnya nilai dasar koperasi dapat menjadi sumber untuk memperbaiki posisi keunggulan kompetitifnya, apalagi jika lingkungan kemiskinan masyarakat anggotanya sudah secara nyata berkurang. Tanpa kembali pada nilai dasar, maka koperasi akan tetap menjadi beban proteksi berkepanjangan dan tidak dapat menjadi alat perjuangan ekonomi para anggotanya sendiri.

Dapat disimpulkan nilai dasar yang menjadi sumber kekuatan koperasi terletak pada kepedulian dan demokrasinya. Karena muatan sosial tersebut tetap membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya dan dengan karakter demokrasi yang tidak mengenal batas pemilik modal, koperasi benar-benar menjamin harkat kemanusiaan yang demokratis.

D. Pembangunan Nasional Berbasis Pertanian

Produksi, pangsa, dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tumbuh positif selama pandemi Covid-19 pada kuartal pertama 2020 sampai awal kuartal tiga 2021. Pertumbuhan positif di sektor ekonomi tradisional itu bisa dikategorikan sebagai penyelamat ekonomi nasional karena sektor-sektor strategis seperti industri dan jasa

terjun bebas menghadapi wabah. Peran sektor pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional tak terduga. Ini harus menjadi *trigger* bagi pengambil kebijakan bahwa sektor pertanian masih strategis dan jangan mengabaikan penguatan pertanian meskipun di balik peran krusial pertanian itu terdapat masalah lain. Kita menyadari bahwa pertanian itu sektor yang memasok kebutuhan perut orang banyak, ada di dalamnya beras dan bahan pangan lainnya, maka jangan pernah mengabaikan sektor pertanian.

Sektor pertanian harus mendapat perhatian khusus dan jangan sekali-kali diabaikan. Sektor ini merupakan tempat bergantung bagi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia di mana 29.8% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian tahun 2020. Sektor pertanian ini juga menghasilkan produk pangan yang menjadi pangan pokok. Jika produksi pangan terganggu, bisa mendorong menaikkan harga dan ini bisa menimbulkan instabilitas politik jika harga pangan naik. Dan jika kita impor, maka ada negara kita terindikasi kedaulatan pangan turun dan perut orang Indonesia tergantung pada negara lain. Dari data statistik 2020 sektor pertanian tumbuh positif. Pada kuartal satu tumbuh 2,2 persen, kuartal dua 2,16 persen, kuartal tiga 2,59 persen, dan awal kuartal empat 2,95 persen (Sibuea, 2020).

Soal pangsa (pasar) data lain menunjukkan, sektor pertanian naik signifikan. Apabila pangsa 2019 sebesar 12,7 persen, angka itu naik menjadi 13,71 persen pada 2020. Pertumbuhan pangsa itu berdampingan dengan enam sektor lain yang strategis seperti sektor kesehatan dan sosial, informasi dan komunikasi, pengadaan air, jasa keuangan dan asuransi, pendidikan, dan real estate. Dan sektor pertanian lebih mengejutkan bisa menjadi penyerap tenaga kerja sebanyak 5 juta selama pandemi. Ketika sektor industri dan sektor lain melakukan rasionalisasi tenaga kerja, sektor pertanian sebaliknya menambah tenaga kerja

pada masa pandemi. Ternyata saat pandemi, sektor pertanian menjadi salah satu katup pengaman ekonomi Indonesia. Pada saat sebagian sektor lain tumbuh negatif, pertanian tetap tumbuh positif. Ini memberikan kontribusi dalam menghambat kemerosotan ekonomi Indonesia, yang secara keseluruhan pada tahun 2020 tumbuh negatif (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kontribusi pertanian lain: menjadi penampung tenaga kerja yang di PHK dari sektor lain dan juga menambah angkatan kerja baru yang masuk ke pertanian. Jadi sektor pertanian mengurangi melonjaknya pengangguran. Penyerapan tenaga kerja pertanian meningkat sekitar 5 juta pada tahun 2020. Namun harus berhati-hati, karena sektor pertanian menjadi pemasok pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) mereka bekerja tetapi tidak menaikkan produktifitas pertanian. Sektor pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional pada masa resesi itu sangat unik. Membandingkannya dengan saat resesi ekonomi dan politik 1997-1999, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penyelamat ekonomi nasional saat itu, sementara resesi ekonomi 2020 yang berperan menjadi "pahlawan" justru sektor pertanian.

Sehingga peran sektor pertanian menjadi sangat kontroversial. Sebagai sektor ekonomi tradisional, pertanian dianggap problematik karena Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian secara statistik rendah. Karena itu sektor pertanian diposisikan menjadi lumbung kemiskinan. Namun, sektor pertanian yang menghasilkan beras menjadi bagian komoditas ekonomi politik yang berpengaruh besar terhadap stabilitas pangan dan politik. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto turun jabatan presiden terkait dengan instabilitas harga pangan. Inflasi tinggi di tengah krisis ekonomi dan politik mengerek harga

pangan sangat tinggi. Tuntutan rakyat terhadap mereka adalah turunkan harga pangan.

Masalahnya restrukturisasi ekonomi menghendaki agar pekerja sektor pertanian jangan terlalu dominan. Negara pertanian seperti Selandia Baru hanya menyerap 10 persen pekerja secara nasional di negara itu. Para ekonom dunia menempatkan, jika sektor pertanian yang dominan menandakan bahwa negara tersebut masuk dalam kategori negara berkembang dengan kemiskinan tinggi. Indonesia sejak masa Presiden Soeharto telah mencanangkan restrukturisasi sektor ekonomi, dengan meningkatkan pekerja sektor industri dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

1. Keperluan Mendasar: Pemberdayaan Pertanian dan Perdesaan

Dalam era transisi demokratisasi saat ini, secara nasional tampak ada keinginan sangat kuat untuk mengangkat derajat kesejahteraan petani yang selama ini merupakan bagian terbesar masyarakat yang “tertinggal” dalam pembangunan. Tekad tersebut paling tidak terlihat dari *jargon-jargon* umum para calon pemimpin negara masa depan dalam setiap kampanye pemilihan presiden. Jika benar bahwa *jargon-jargon* tersebut akan menjadi landasan kebijakan pemerintahan masa depan ini, maka hal itu berarti akan menempatkan pembangunan nasional dalam *mainstream* pembangunan pertanian, dengan petani sebagai subyek utamanya. Hal ini mengingat besarnya potensi sumber daya (*resource endowment*) dan besarnya masyarakat Indonesia yang bergantung pada bidang pertanian dalam arti luas. Ke depan, pertanian berwawasan agribisnis mestinya diletakkan pada posisi sentral di dalam pembangunan ekonomi, pertanian dan perdesaan (Mubyarto, 2002).

Peringatan dari para ekonom pertanian tersebut menjadi amat sangat penting bagi keseluruhan bangsa ini, terutama bagi para pemimpin pengelola negara mendatang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mengapa demikian? Indonesia sebagaimana negara-negara agraris berkembang lain, bagian terbesar potensinya adalah sumber daya pertanian dengan sebahagian terbesar penduduknya para petani, akan tetapi sejauh ini justru belum menunjukkan peningkatan kehidupan dan kesejahteraan. Banyak bukti menunjukkan kecendrungan itu. Secara makro misalnya, ketidak serasian karena tajamnya penurunan *Gross Domestic Product* pertanian (dari sekitar 80% GDP nasional di tahun 1950-an menjadi hanya 17% di awal milenium ini) dibanding lambatnya penurunan *share* ketenagakerjaannya (dari sekitar 90% di tahun 1950-an menjadi 46% di awal milenium ini) menunjukkan betapa rendahnya produktivitasnya. Globalisasi tampaknya juga tidak berpihak pada pertanian, dengan terjadinya kecenderungan konsisten penurunan harga-harga riil produk primer pertanian tersebut secara agregat tentu akan menyulitkan posisi petani dan pertanian masa depan. Petani sebagai *the real investors* seringkali tidak menjadi perhatian dan bahkan diabaikan oleh pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan tampaknya masih *friendly* dengan para pengusaha besar dan sektor di luar pertanian. Sektor pertanian tidak hanya memerlukan tingkat suku bunga yang tepat, tetapi juga akses dan kemudahan lain yang dapat dimengerti oleh pelaku sektor pertanian. Dalam pada itu, secara mikro wilayah banyak emplementasi pembangunan pertanian yang masih menjadi keprihatinan, misalnya semakin terbatasnya penguasaan dan skala usaha akibat konversi terus menerus lahan produktif pertanian kebukan pertanian teknologi yang relatif stagnan dan "miskin" terbosan baru, serta kecendrungan keterpisahan

(*decoupling*) pertanian antarskala dan wilayah, baik horizontal maupun vertikal (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Mencermati keadaan di atas, sangat diperlukan pemikiran atau konsepsi dasar bagi pembangunan pertanian masa depan, terutama dengan mengaitkannya dengan upaya pembangunan kelembagaan (*institutional building*). Upaya kelembagaan tersebut menjadi sangat penting terutama dalam rangka mengakselerasi modal sosial bagi kebutuhan pembangunan ekonomi pertanian yang berdaya saing, lebih demokratis, berkerakyatan, sehingga diharapkan lebih mensejahterakan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Semoga, pengelola negara masa depan mengkontemplasikannya menjadi landasan kebijakan pembangunan ekonomi nasional mendatang, dan merealisasikannya di lapangan.

Mendalami potret pembangunan pertanian berwawasan agribisnis saat ini, secara nasional sungguh-sungguh masih memprihatinkan. Agribisnis yang sejak tahun 80-an secara nasional telah diposisikan sebagai *a new way to look agriculture, a new agriculture paradigm*, ternyata pada tingkatan konsepsional saja masih banyak menyimpan berbagai kesalahan pengertian dan pemahaman bagi sementara pihak, sehingga implementasinya pun menjadi jauh dari hakikat tujuan pengembangan agribisnis itu sendiri. Sebagai *buzz word*, *agribisnis* memang telah sangat populer. Terminologinya telah membudaya mulai dari pucuk pimpinan negara, berbagai pertemuan ilmiah dan seminar, dokumen-dokumen pemerintahan hingga ke tingkat penyuluh dan bahkan masyarakat umum. Akan tetapi, implementasi konsepsi agribisnis tersebut ternyata tidak sejalan dengan popularitas istilahnya.

Sebagai suatu paradigma berfikir baru, agribisnis pada dasarnya menekankan pada cara pandang yang melepaskan diri dari sebuah “tradisi” konvensional yang

selama ini dianut, ketika membicarakan pertanian. Pertanian tidak hanya dipandang sebagai suatu sistem kegiatan *on-farm* semata-mata, akan tetapi mencakup berbagai subsistem dalam keseluruhan sistem, yang disebut agribisnis.

Bagi Indonesia khususnya, agribisnis bukanlah sekedar bertujuan untuk membuat kegiatan pertanian menjadi berdaya saing saja (sehingga mampu berkompetisi dalam arena global), akan tetapi lebih penting dari itu harus mampu membuat petani lebih produktif dan sejahtera. Oleh karena itu, membangun pertanian berdasarkan pendekatan agribisnis selain memperhitungkan 'nilai pertukaran' (*exchange value*) sebagai parameter, harus menginternalisasikan nilai-nilai lain yang sebenarnya melekat (*inherent*), yaitu *instrumentals values* (*value added values*) dan *intrinsic value* (*existence value*). Dengan demikian dalam subyek pembangunan di mana aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi bagian daripadanya, maka nilai-nilai pada setiap kegiatan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis tidak perlu diperhitungkan di bawah nilai sebenarnya (*under value*), sebagaimana yang terjadi selama ini dalam harga-harga produk pertanian.

Oleh karena itu, strategi besar dalam membangun pertanian masa depan seharusnya tidak cukup hanya diletakkan dalam kerangka agribisnis yang sempit, akan tetapi harus mengembangkan pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan dan berkeadilan. Mengapa demikian?. Melalui pendekatan pembangunan pertanian seperti itu, nilai-nilai *intrinsic* dan *existence* akan dipertimbangkan dan bahkan diinternalisasikan sebagai bagian dari parameter dalam setiap strategi pembangunan pertanian yang dilakukan. Dengan cara berpikir inilah, harga (*value*) setiap kegiatan pertanian akan diperhitungkan secara "adil" karena pada hakekatnya

“harga” (*price*) adalah bersifat *public goods*, dan oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah untuk senantiasa “menjaga” parameter dan dinamika harga-harga tersebut dalam koridor yang “benar” dan berkeadilan bagi masyarakat banyak.

Namun demikian, pada tataran konsepsional saja, saat ini kita masih banyak menghadapi atau menjumpai kesalah-pengertian tentang apa yang dimaksud dengan agribisnis tersebut. Beberapa kesalahan-pengertian tersebut antara lain (Soetriono, et.al., 2019):

1. Agribisnis diartikan sebagai suatu kegiatan pertanian komersial, atau petani yang berbisnis atau sekedar berorientasi pasar. Pengertian tersebut menghilangkan makna “sistem” dan keterkaitan antarsubsystem, yang menjadi “sukma” bagi wawasan agribisnis itu sendiri;
2. Agribisnis hanya diartikan sebagai perusahaan-perusahaan besar di bidang pertanian, sehingga memperkecil pengertian dan lingkup kesistemannya;
3. Agribisnis hanya dipandang sebagai suatu “program” bagi kementerian pertanian, sehingga menghilangkan esensinya sebagai *a new paradigm*.
4. Agribisnis diartikan sebagai sektor yang berkonotasi sempit, dan lainnya.

Kesalahan-pengertian makna tersebut tampaknya telah menjadi salah satu sebab “bias”nya sementara pihak dalam mendalami dan mencermati secara benar problema pertanian. Masalah pertama, utama dan mendasar yang dihadapi bangsa dalam pertanian adalah semakin buram dan memperhatikannya potret kehidupan para petani. Struktur petani dan pelaku pertanian secara nasional sangat beragam, demikian pula dengan bidang kegiatannya. Bagian terbesar petani di Indonesia pada

dasarnya dapat dikategorikan dalam karakteristik petani "gurem" baik buruh tani maupun yang subsisten tradisional (*peasant*) dan masih semi komersial (*pseudo farmer*), selain sebagian kecil lain merupakan petani berkarakteristik komersial dan perusahaan pertanian atau perusahaan agribisnis baik dalam level nasional maupun *multi national corporation*.

Sekitar sepuluh tahun lalu, Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 34.65 juta usaha mikro (98.1 persen dari total), usaha kecil (1.3persen) menengah dan besar (0.6 persen), dengan total tenaga mencapai 67 juta orang. Sebesar 57 persen aset dikuasai usaha besar dan hanya 21 persen saja yang dikuasai usaha kecil, yang justru mampu menyediakan lapangan kerja sekitar 89 persen, dan menyumbang sekitar 41 persen GDP. Bila dilihat dari bidang pembangunannya, usaha mikro dan kecil di bidang pertanian mempunyai kontribusi terbesar, yaitu 57, persen industri 7, persen serta perdagangan dan jasa sebesar 36 persen. Saat ini secara garis besar struktur tersebut tidak banyak berubah. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa pola agribisnis kita masih sangat didominasi dan ditopang dari usaha pertanian rakyat yang berskala kecil ("gurem") dengan tenaga kerja yang relatif "kurang trampil" dan tersebar di berbagai wilayah tanpa ikatan skala. Sebagaimana telah diungkapkan, kegiatan usaha tersebut seringkali masih belum sepenuhnya berorientasi pasar-komersial dan bahkan sebagian masih cenderung subsisten-tradisional, tentu dengan keragaman penggunaan teknologi yang sangat tinggi.

Dualistic problem dalam kegiatan pertanian sebagaimana dipreposisikan Boeke tetap menjadi masalah penting bagi pembangunan pertanian. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat kritis untuk meluruskan atau menjernihkan kesalahan pengertian tersebut, jika tidak ingin dijumpai potret masa depan petani dan pertanian

yang semakin memprihatinkan pada bangsa ini ke depan. Bagian besar pelaku pertanian membutuhkan hakekat kebijakan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebagian kecil lainnya, yang justru “menguasai berbagai sumberdaya produktif yang dibutuhkan bagi suatu pembangunan pertanian kita diyakini tidak akan mampu mengatasi masalah dasar dan struktural dalam pertanian. Misi inilah sebenarnya yang menjadi landasan dari agribisnis sebagai suatu paradigma baru dalam pembangunan pertanian kita (Panji Anogoro dan Ninik Widyanti, 2003).

Jika disepakati bahwa agribisnis sebagaimana diuraikan di atas adalah cara pandang baru (*a new paradigm*) bagi bangsa ini dalam membangun dan mengembangkan pertanian sesuai dengan hakekat tujuan dasarnya (baca: meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani) dengan memperhatikan potret petani dan pertanian di Indonesia yang sangat dualistik saat ini, maka hal pertama dan utama yang secara teoritis dibutuhkan adalah upaya kelembagaan (*institutional building*) yang akan memampukan dan memberikan landasan kondusif (*enabling*) bagi berkembangnya kehidupan petani dan pertanian masa depan. Upaya kelembagaan tersebut harus dipandang sebagai suatu prasyarat keharusan (*necessary condition*) bagi suatu rekonstruksi dan restrukturisasi ekonomi (pertanian) secara menyeluruh.

Berkembangnya prasyarat keharusan tersebut pada dasarnya merupakan tugas utama pemerintah dalam mewujudkan keberpihakannya melindungi” dan “memberdayakan” petani dan pertanian. Tanpa prasyarat keharusan tersebut, diyakini tidak mampu menjadi *trigger* pemberdayaan petani dan membuka ekonomi perdesaan. Segala bentuk upaya manajemen untuk membangun kehidupan petani dan pertanian yang dilaksanakan tanpa menyentuh atau mengkonstruksi ulang kelembagaan

pertanian yang ada, diyakini tidak substansial sehingga tidak akan mampu mengatasi hakekat problema yang sedang dihadapi pertanian bangsa ini. Sayangnya, upaya-upaya kelembagaan yang dilakukan selama ini kurang tercermin sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan pertanian, sehingga posisi ekonomi petani tetap menempati stratum terbawah dalam konstelasi struktur ekonomi Indonesia saat ini, dan bahkan sedang konstelasi struktur ekonomi Indonesia, saat ini dan bahkan sedang mengalami involusi yang mengkhawatirkan. Dibutuhkan kehadiran suatu kebijakan sosial ekonomi yang mendasar dan komprehensif dalam pembangunan agribisnis, sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi petani (Mubyarto, 2001).

Upaya kelembagaan sebagai prasyarat keharusan dalam membangun pertanian (agribisnis) berdaya saing dan berkeadilan diharapkan dapat menjadi “kunci pembuka”. Akan tetapi, “kunci pembuka” inipun diyakini tidak akan cukup tanpa adanya upaya-upaya manajemen dalam mengembangkan agribisnis sesuai lingkungan internal maupun eksternalnya. Harus ada semacam prasyarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa upaya manajemen (*management building*). Dinamika dan keragaman yang tinggi dalam karakteristik lingkungan produksi agribisnis tentu tentu memerlukan antisipasi yang tinggi pula dalam mengeliminasi dampak-dampak yang tidak dikehendaki.

Hal yang sama terjadi dalam aspek sosial budaya yang juga terus mengalami perubahan, terutama dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi (misalnya dari rumah tangga ke *food service industry*, berkembangnya *grazing food* dan *stred food* serta pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran yang sedang dan akan merubah cara-cara konsumen dalam mengevaluasi suatu produk).

Jelas karakteristik dan kecendrungan perkembangan karakteristik agribisnis mempunyai implikasi penting dalam manajemen agribisnis. Oleh karena itu, meningkatkan kontribusi agribisnis dalam suatu konstruksi perekonomian secara keseluruhan adalah sama dengan membangun manajemen agribisnis pada berbagai kondisi yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah, karakteristik proses produksi dan produk agribisnis yang berbasis pada proses biologis mengisyaratkan bahwa perusahaan agribisnis haruslah terintegrasi secara vertical. Hal ini memberi arti bahwa subsistem agribisnis hulu, budidaya dan subsistem hilirnya diharapkan berada pada satu sistem manajemen yang integratif secara vertical. Tuntutan integrasi vertical ini pada dasarnya dilandasi oleh argument teknis maupun argument finansial/ekonomi.

Berdasarkan argumen teknis, antara kaitan sektor hulu-hilir memiliki ketergantungan teknis yang sangat tinggi sesuai karakteristik produk biologis. Untuk menghasilkan produk bawang merah dengan residu pestisida rendah misalnya, tidak mungkin dicapai bila hanya mengandalkan kegiatan produksi pada sektor hilir saja, tapi harus didukung oleh teknologi budidaya dengan penggunaan pestisida seminimum mungkin (pada sektor budidaya). Teknologi budidaya seperti itu hanya mungkin dilakukan bila bibit bawang merah yang dihasilkan pada sektor hulu adalah bibit yang tahan penyakit dan produktivitas hasilnya tinggi (misalnya teknologi bibit *transgenic*). Contoh ini menunjukkan perlunya konsistensi produk (jumlah, jenis, mutu, kontinuitas) yang hanya mungkin dicapai bila sektor hulu, budidaya dan hilir dalam agribisnis dikelola dalam suatu manajemen yang integratif (Dhananjay Apparo, et.al., 2019).

Dari segi ekonomi, tuntutan pengelolaan/pengusahaan integrasivertikal agribisnis pada dasarnya untuk menghilangkan (meminimumkan) ketimpangan margin

pada berbagai sektor hulu, budidaya dan hilirnya. Keadaan buruk inilah yang seringkali terjadi pada kegiatan agribisnis saat ini. Agribisnis yang dikelola tidak secara integratif (tersekat-sekat, sendiri-diri) memberi dampak masalah ketimpangan margin, dan biasanya sektor budidaya menjadi korban karena struktur ekonomi yang dualistik. Informasi pasar (sebagai akibat perubahan selera, konsumen, harga) tidak ditransmigrasikan secara “adil” kepada sektor hilir, budidaya dan hulunya, bahkan cenderung ditahan untuk memperkuat posisi monopsonitis pada sektor hulunya. Selain itu, manajemen agribisnis yang tidak integratif akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi pada sektor agribisnis, lebih-lebih dalam struktur ekonomi yang dualistik (sektor budidaya dengan petani dan UMKM, sektor hulu dan hilir dengan industri besar) (Ibnoe Soedjono, 2003).

Manajemen agribisnis integrasi vertical juga memungkinkan agribisnis untuk meningkatkan penetrasi pasar (*market penetration*) mengembangkan pasar (*market development*) maupun pengembangan produk (*product development*) melalui strategi-strategi pemasaran 4p (*price, product, place, promotion*) melalui *agri supply chain*. Diramalkan bahwa perkembangan pasar modern, utamanya *supermarket* dan *hypermarket* akan dengan segera mengambil alih peranan pasar tradisional. Hal ini telah terjadi di beberapa negara lain, seperti negara-negara Amerika latin, Asia, dan Afrika. Oleh karenanya, ketidakmampuan petani kita untuk beradaptasi dan terkait dengan *supply chain* pasar modern, akan menyebabkan masuknya produk pertanian dan malah mungkin produsen/petani dari luar negeri.

Karakteristik konsumen produk agribisnis yang sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya dan segala keragamannya, memerlukan diferensiasi 4p untuk peningkatan pangsa pasar. Dengan perkataan lain, dengan

manajemen integrasi vertical memungkinkan perusahaan agribisnis untuk lentur dalam volume, mutu produk, *delivery*, dan lain-lain untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi. Inilah tantangan manajemen sekaligus “tekanan” bagi petani dan pertanian kita menyongsong masa depannya.

2. Institutional Building: Upaya Memberdayakan Pertanian dan Ekonomi Perdesaan

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian (*agribisnis*) masa mendatang adalah sejauh mungkin mengatasi masalah dan kendala kritikal yang sampai sejauh ini belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Satu hal yang sangat kritis adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian (*agribisnis*) selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit *agribisnis* terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (*integrated farming system*). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut *on farm business* saja, akan tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek *off farm agribusinessnya*.

Jika ditelaah, walaupun telah melampui masa-masa kritis krisis ekonomi nasional, saat ini sedikitnya kita masih melihat beberapa kondisi yang dihadapi petani di dalam mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, yaitu (Sibuea, 2018):

1. Akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (*access to resources*), seperti keterbatasan aset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya;

2. Produktivitas dan tenaga kerja yang relatif rendah (*productive and remunerative employment*), sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, keterampilan dan pengelolaan sumberdaya yang efisien;
3. Perasaan ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan (*access to services*) sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*) dari bawah;
4. Kurangnya rasa percaya diri (*self reliances*), akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga dan lingkungan.

Mubyarto (2016) menyebutkan bahwa secara klasik sering diungkapkan bahwa penyebab utama ketimpangan pendapatan dalam pertanian adalah ketimpangan pemilikan tanah. Hal ini adalah benar, karena tanah tidak hanya dihubungkan dengan produksi, tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan kelembagaan, seperti bentuk dan birokrasi dan sumber-sumber bantuan teknis, juga pemilikan tanah mempunyai hubungan dengan kekuasaan baik di tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih tinggi. Manfaat dari program-program pembangunan pertanian di perdesaan yang datang dari "atas" tampaknya hanya jatuh pada kelompok pemilik tanah, sebagai lapisan atas dari masyarakat desa. Sebagai contoh, program kredit dengan jaminan tanah serta bunga modal, subsidi paket teknologi, teknologi produksi, bahkan control terhadap distribusi pengairan dan pasar lokal juga dilakukan oleh kelompok ini. Di lain pihak, pelaksanaan perubahan seperti *landreform*, *credit reform* dan sebagainya yang memang secara substansial diperlukan sebagai suatu cara redistribusi asset masih merupakan isu yang kurang populer. Berbagai langkah terobosan sebagai suatu upaya kelembagaan guna memecahkan permasalahan di atas

yang dikembangkan seperti pengembangan sistem usaha tani sehamparan, pola PIR dan sebagainya, sama sekali belum memecahkan problem substansial yang oleh Boeke diungkapkan sebagai “dualisme”.

Dalam pada itu, karakteristik perdesaan seringkali ditandai dengan pengangguran, produktivitas dan pendapatan rendah, kurangnya fasilitas dan kemiskinan. Masalah-masalah pengangguran, setengah pengangguran dan pengangguran terselubung menjadi gambaran umum dari perekonomian saat ini. Pada waktu yang sama, terjadi pula produktifitas yang rendah dan kurangnya fasilitas pelayanan penunjang. Rendahnya produktifitas merupakan ciri khas di kawasan perdesaan. Pada umumnya, sebagian besar petani dan para pengelola industri perdesaan, bekerja dengan teknologi yang tidak berubah. Investasi modal pada masa sebelum krisis lebih banyak diarahkan pada industri perkotaan daripada di sektor pertanian perdesaan. Sebagai konsekuensinya, perbedaan produktifitas antara petani perdesaan dengan pekerja industri perkotaan semakin besar senjangnya. Hal ini merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam menyoroiti ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, pertanian dan bukan pertanian (Sri Edi Swasono, 1987).

Pelayanan publik bagi adaptasi teknologi dan informasi terutama untuk petani pada kenyataannya sering menunjukkan suasana yang mencemaskan. Di satu pihak memang terdapat kenaikan produksi, tetapi di lain pihak tidak dapat dihindarkan terjadinya pencemaran lingkungan, terlemparnya tenaga kerja ke luar sektor pertanian yang tidak tertampung dan tanpa keahlian/ketrampilan lain, ledakan hama karena terganggunya keseimbangan lingkungan dan sebagainya. Manfaat teknologipun seringkali masih dirasakan lebih banyak dinikmati pemilik aset sumberdaya (tanah) sehingga pada gilirannya justru menjadi penyebab utama

dalam mempertajam perbedaan pendapatan dan mempercepat polarisasi dalam berbagai bentuk. Perasaan ketidak-amanan dan kurang-adilan akibat berbagai kebijakan dan kebocoran (misalnya kasus impor *illegal, damping*, pemalsuan dan ketiadaan saprotan, keracunan lingkungan, jatuhnya harga saat panen dan lainnya) seringkali menjadi pelengkap rasa tidak percaya diri (dan apatisme berlebihan) pada sebagian petani.

Tinjauan holistik dengan memperhatikan kondisi berbagai aspek kehidupan pertanian dan perdesaan seperti diuraikan di sini, menunjukkan bahwa inti esensi dari proses pembangunan pertanian dan perdesaan adalah transformasi structural masyarakat perdesaan dari kondisi perdesaan agraris tradisional menjadi perdesaan berbasis ekologi pertanian dengan perusahaan bersistem agribisnis, yang menjadi inti dari struktur ekonomi perdesaan yang terkait erat dengan sistem industri, sistem perdagangan dan sistem jasa nasional dan global.

Mencermati situasi di atas, jelas sangat diperlukan upaya-upaya pengembangan agribisnis yang lekat dengan peningkatan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat agribisnis terutama skala mikro dan kecil dalam suatu kebijakan yang "berpihak". Keberpihakan kebijakan semacam itu sangat (baca: mutlak) diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan pengembangan agribisnis yang berorientasi ekonomi kerakyatan keadilan, dan sekaligus meningkatkan daya saing dalam iklim "kebersamaan" pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Untuk itu, sebagai prasyarat keharusan diperlukan suatu iklim kebijakan yang mendorong terbangunnya institusi (kelembagaan) yang mampu meningkatkan posisi petani menjadi bagian dari suatu kebersamaan entitas bisnis, baik dalam bentuk kelompok usaha bersama, koperasi, korporasi (*community corporate*) ataupun *shareholder*. Upaya kelembagaan tersebut diyakini akan dapat menjadi nilai

(*value*) baru, semangat baru bagi petani untuk terutama dapat melonggarkan keterbatasan-keterbatasannya, seperti akses terhadap sumberdaya produktif (terutama lahan), peningkatan produktivitas kerja, akses terhadap pelayanan dan rasa keadilan, serta meningkatkan rasa percaya diri akan lingkungan yang aman, adil dan transparan (Wahyu Sukotjo, 1987).

Manifestasi dan implementasi dari upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya bukanlah mudah dan sederhana. Sebagai suatu *rules* atau nilai dan semangat baru dalam pembangunan pertanian ke, depan seyogyanya mengandung berbagai ciri pokok dan mendasar. Pertama, upaya kelembagaan tersebut diharapkan menjadi pendorong terciptanya *the same level playing field* bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya, berdasarkan “aturan main” yang *fair, transparent, demokratis* dan adil. Kedua, upaya kelembagaan tersebut mampu mendorong peningkatan basis sumberdaya, produktivitas, efisiensi dan kelestarian bagi kegiatan-kegiatan produktif pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

E. Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Pertanian dalam Pembangunan

Yaitu dengan melakukan reposisi peran koperasi sebagai instrumen kelembagaan ekonomi perdesaan. Koperasi dari sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu antara *selfhelp cooperation* atau *individualitet-solidaritet* (Mohammad Hatta) selalu disebut bersamaan untuk menggambarkan dasar pendirian koperasi. Dengan cara pandang ini koperasi sering dilihat sebagai kerja sama pasar dari sebagian pelaku ekonomi dalam melawan ketidakadilan pasar yang terjadi. Sementara kerja sama yang melibatkan lebih dari satu orang yang menempatkan

kebersamaan sebagai dasarnya maka tidak dapat terlepas dari dimensi sosial. Oleh karena itu koperasi juga sering ditempatkan sebagai bentuk *member base economic organization* *fiz a fiz capital base economic organization*. Gambaran inilah yang menjadikan koperasi selalu menjadi pilihan untuk mengatur ekonomi orang yang banyak yang lemah dalam menghadapi persaingan pasar. Namun karena sejarah pengenalan koperasi yang berbeda maka pemikiran koperasipun juga berkembang dengan madzab yang berbeda-beda bahkan kaitan antara dimensi ekonomi murni dengan masalah politik dan sosial banyak campur aduk, terutama di negara sedang berkembang (Mohammad Hatta, 1985).

Hingga tahun 1961 praktis kita belum pernah menemukan definisi koperasi yang didokumentasikan secara formal dan diakui oleh dunia internasional, meskipun koperasi telah hadir sejak abad 18. Koperasi diberikan pengertian yang diterima internasional pada awalnya oleh organisasi bukan milik gerakan koperasi, tetapi justru oleh lembaga internasional yang menangani masalah perburuhan yakni ILO. ILO lebih menekankan pada peran koperasi sebagai instrument untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja, oleh karena itu yang menonjol adalah persyaratan seseorang untuk menjadi anggota koperasi, sehingga lebih ditekankan pada kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi. Pada tahun 1990an di tengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, koperasi dunia juga mempertanyakan kelangsungannya di tengah arus swastanisasi dan persaingannya yang semakin tajam sebagaimana terlihat dalam kongres Tokyo 1992. Namun pada tahun 1995 gerakan koperasi dunia melalui kongresnya di Manchester Inggris menjawab dengan dua tema pokok kembali kepada nilai dan jatidiri koperasi dan menempatkan koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan (*enterprise*) dengan

pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaannya yang terbuka dan sukarela. Gerakan koperasi kembali menyatakan keharusan bagi koperasi untuk menjunjung tinggi nilai etika (*ethical values*) yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada pihak lain (*honesty, openness, social responsibility and caring for others*). Sejak itu gerakan koperasi dunia memiliki definisi secara formal dan tertulis untuk menjadi kesepakatan gerakan koperasi dunia.

Di kawasan Asia Pasifik sejak 1990 telah terjadi interaksi yang baik antara gerakan koperasi dan pemerintah melalui pertemuan dua tahunan. Dalam menanggapi dinamika kawasan yang sedang telah terjadi telah menetapkan beberapa prinsip sebagai dasar untuk membangun tindakan bersama yaitu (Zelhuda Shamsuddin, et.al., 2017):

1. Koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya, dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi (otonom dan independen).
2. Potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan.
3. Koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaan mereka dan apa yang dapat mereka perbuat.
4. Koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lain bila terjadi lapangan permainan yang sama (*fair flaying field*).
5. Pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (*self regulation*).

6. Koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumber dayanya dengan tidak mengancam identitas dan jati dirinya, dan
7. Bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila kemitraan ini menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

Ketujuh sikap ini akan mendasari desakan gerakan koperasi terhadap anggotanya dan pemerintah di negara masing-masing, sehingga dapat kita pandang sebagai gerakan pola salju yang akan dilakukan oleh masyarakat koperasi dunia.

Potret koperasi Indonesia setelah lima puluh lima tahun berkembang dalam suasana demokrasi terpimpin dan sentralisasi kekuasaan serta politik masa mengambang ternyata tetap hadir di dalam perekonomian kita. Potret koperasi program meskipun mencatat keberhasilan bagi pelaksanaan program pemerintah (Swasembada beras maupun pembangunan pertanian dalam arti luas dan pemeliharaan stabilitas ekonomi), namun ternyata menimbulkan antipati pada masyarakat. Namun gambaran tersebut ternyata hanya menyentuh sekitar 20 persen dari jumlah koperasi yang ada (12.000 koperasi/KUD dari 52.000 koperasi keseluruhan) dan hanya menimbulkan pengaruh pada kurang dari 45 persen pembentukan aset koperasi. Sehingga apabila kita jujur masih terlalu besar kenyataan swadaya koperasi dan manfaatnya bagi mendorong roda perekonomian. Koperasi kredit (kredit, simpan pinjam dan kegiatan pembiayaan oleh koperasi) menguasai 55 persen dari aset koperasi melayani hampir 11 juta nasabah serta menempati tempat ke dua dalam pasar kredit mikro setelah BRI Unit Desa. Sehingga koperasi kredit telah menjadi jaringan terluas dan paling dekat

dengan kegiatan ekonomi lapis bawah yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi rakyat. Sektor kegiatan ini praktis tidak menjadi perhatian pemerintah, meskipun berbagai upaya telah dirintis oleh program negara donor (Sibuea, 2018).

Dengan melihat pengalaman dari berbagai negara dan refleksi pengalaman Indonesia yang sarat dengan intervensi selama lima puluh tahun dan represi sedemikian lama masih menyisakan karakter kemandirian pada sebagian besar masyarakat koperasi, maka koperasi tetap dapat menjadi instrument bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi ketidakadilan pasar sepanjang orang diluar koperasi tidak menetapkan persyaratan koperasi dan mencampuri mekanisme koperasi. Adalah tidak adil jika kita mengadili koperasi Indonesia dengan ejekan, padahal kebiasaan yang dikonotasikan tidak baik itu hanya melanda sebagian kecil koperasi yang terkait dengan program dari luar koperasi dan koperasi tidak berdaya menolaknya. Gugatan ketidakadilan ini selayaknya dialamatkan kepada semua pihak selain pemerintah, para ilmuwan, kaum politisi dan media serta gerakan koperasi sendiri yang perhatiannya bias kepada koperasi program. Sehingga pengamatan yang seimbang terhadap gerakan koperasi menjadi terpinggirkan. Untuk dampak tersebut kita patut angkat jempol bahwa dari hari ke hari masih semakin banyak orang yang ingin membangun koperasi secara benar dan menjadi baik, inilah salah satu kekuatan koperasi sebagai perusahaan yang didirikan *one for last*.

Negara mengatur dalam rangka menjaga aturan main yang jelas dan memberikan perlindungan publik terhadap masyarakat baik yang berkoperasi maupun yang berada diluar koperasi. Dengan demikian peran pengaturan dijaga tidak menjadi intervensi yang menimbulkan ketergantungan. Di banyak negara para pendukung gerakan koperasi selalu menempatkan prinsip:

kerja keras dan berusaha dengan keras, jika gagal datang ke pemerintah, jika pemerintah tidak mampu maka kerja sama dengan dan bersama koperasi lain. Semangat ini masih mungkin ditanamkan kembali dan ketergantungan dapat dihindari apabila ada “institusi perantara” yang merupakan representasi kepentingan koperasi dan pemerintah serta *stakeholder* lainnya. Pendekatan penguatannya harus lugas pada pendekatan bisnis untuk membantu bisnis koperasi berkembang. Dari segi pendekatan, hal ini berarti memadukan antara pendekatan *supply driven* dengan *demand driven* dalam pemberian dukungan perkuatan kepada koperasi.

Koperasi memang hanya akan berkembang apabila ada orang yang peduli, menaruh perhatian kepada kepentingan hidup sesama karena koperasi adalah sesuatu metoda menjalankan bisnis yang modern dengan aturan main tidak sekedar bisnis. Inilah yang harus dipahami sebelum kita membahas wacana koperasi, karena jika tidak dipahami kita akan terjebak dalam penilaian maju tidaknya koperasi dari kacamata pemiliknya.

Sejak kemerdekaan pelebagaan koperasi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia harus diakui ditempuh melalui pola “penitipan”, yaitu dengan menitipkan koperasi pada tiga kekuatan ekonomi terpenting ketika itu. Ketiga jalur kekuatan ekonomi tersebut adalah : (i). Program Pembangunan Ekonomi Pemerintah (terutama koperasi desa dan koperasi pertanian); (ii). Lembaga-lembaga pemerintah, baik sipil maupun militer; dan (iii). Perusahaan-perusahaan besar nasional baik milik negara maupun milik swasta. Kedua jenis yang terakhir ini umumnya ditujukan kepada para konsumen. Hal ini secara sadar dilakukan karena kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya masih diliputi oleh beban tingkat pendapatan rendah dan sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan tingkat pendidikan yang

rendah. Sebagai organisasi modern koperasi memerlukan prasyarat yakni tingkat pendapatan anggota yang menggambarkan kemampuan partisipasi potensial seseorang harus cukup untuk mendukung sebuah bisnis yang bersaing atau dapat memenuhi kelayakan ekonomi. Keadaan ini masih diperparah lagi oleh kuatnya tradisionalisme kepemimpinan yang berseberangan dengan syarat hadirnya demokrasi dalam koperasi sebagai suatu nilai dasar koperasi (Bayu Krisnamurthi, 2002).

Dengan cara berpikir semacam itu maka pengembangan koperasi di Indonesia lebih menekankan kepada basis kekuasaan yang dicerminkan oleh kekuasaan terhadap wilayah pemerintahan (koperasi berbasis wilayah seperti desa, wilayah unit desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan seterusnya). Di sisi lain wilayah kekuasaan ini juga diberlakukan bagi kekuasaan terhadap unit atau satuan kekuasaan berdasarkan unit pemerintahan, komando maupun satuan perusahaan/unit perusahaan. Strategi ini ditempuh karena yang diinginkan para pemikir koperasi pada saat itu adalah pertumbuhan lembaga koperasi (pelembagaan) agar segera dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan berperan nyata dalam perekonomian nasional. Strategi ini antara lain juga terlihat dari formula cita-cita posisi koperasi dalam UUD 1945 (bangun perusahaan yang sesuai), UU 12/1967 (urat nadi perekonomian), GBHN-GBHN dan UU 25/1992 (sokoguru perekonomian).

Dalam pengalaman Indonesia unsur membangun koperasi sebagai kerja sama pasar yang menjadi fenomena kelahiran koperasi di Eropa Barat dan Amerika tidak kelahiran sebagai ciri koperasi Indonesia. Hal ini karena ketika ingin menggerakkan koperasi Indonesia belum memiliki basis yang dibutuhkan untuk tumbuhnya sebuah koperasi yang rasional yaitu tingkat pendapatan per kapita yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan rata-rata

masyarakat yang cukup. Inggris pada masa revolusi Industri yang bersamaan dengan lahirnya koperasi Rochdale memiliki pendapatan per kapita sekitar US \$ 500,-, sementara ketika Denmark memulai gerakan pendidikan untuk kebangkitan para petani yang menjadi program utama adalah petani harus mengenyam pendidikan pertanian tingkat atas (*landbouw school*) dan tingkat pendapatan per kapita ketika itu diperhitungkan Balile (Holeo metry) sekitar US \$ 350,-. Keadaan semacam ini baru kita capai pada saat kita memasuki memasuki dasawarsa delapan puluhan ketika pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Indonesia berada pada tingkat sekitar Denmark pada akhir awal abad 18 (Mubyarto, 2002).

Meskipun Undang-Undang Koperasi yang menetapkan koperasi basis wilayah dengan proteksi dari persaingan sesama koperasi sesuai UU 12/1967 telah diganti dengan UU 25/1992 yang mendasarkan koperasi pada basis domisili dan membuka persaingan, namun praktis pelaksanaannya baru terlaksana pada pertengahan 1998 ketika Inpres 4/1984 dicabut yang menandai berakhirnya reservasi KUD dan membuka KUD ke koperasi jalur normal. Dengan demikian pada saat ini format perkembangan koperasi adalah format koperasi basis wilayah yang dihadapkan pada format persaingan pasar, sehingga pembahasan tentang posisi koperasi menuju masa depan tidak terlepas dari bagaimana koperasi melalui masa transisi ini (Bahri Nuridin dan Yusdy Achmad, 1987).

Untuk melihat posisi koperasi Indonesia sebelum melihat mengenai kondisi obyektif koperasi pada hari yang lebih penting adalah memahami kedudukan koperasi dalam konteks perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi pasar yang sedang berlangsung. Sisi normatif kedudukan penting koperasi terlalu sering dikaitkan dengan berbagai cita-cita nasional yang normatif, tetapi

jarang dipahami dalam konteks pasar yang diperlukan bagi orang di luar gerakan koperasi atau “*non student of cooperatives*”. Oleh karena itu pada bagian berikut ini akan dijelaskan fungsi koperasi dalam kerangka perekonomian pasar. Dan selanjutnya akan dikupas kondisi koperasi memasuki abad 21 sebagai pangkal tolak penyusunan proyeksi peran koperasi dan penyusunan langkah persiapan yang diperlukan. Dalam analisis proyeksi perkembangan koperasi digunakan metoda komparasi antarwaktu dan antarkelompok dengan menekankan pada analisis struktur kekuatan koperasi.

C. Fungsi Koperasi Dalam Ekonomi Pasar

Dalam konteks ekonomi pasar koperasi sebagai asosiasi perorangan harus dilihat sebagai organisasi atau metoda menjalankan usaha untuk melakukan kerja sama pasar dari anggotanya sebagai pelaku ekonomi. Dalam suatu perekonomian, pelaku pasar adalah para produsen dan konsumen selain pemerintah yang di semua negara berperan melalui pelaku ekonomi, melalui aktivitas produksi dan konsumsinya. Sebelum melangkah lebih jauh perlu kita lihat posisi gerakan koperasi di dunia dalam memposisikan dirinya pada saat ini dengan melihat definisi koperasi sesuai Kongres Koperasi Dunia di Manchester 1995 sebagai berikut:

A cooperatives is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.

Dalam konteks di atas pada dasarnya ada tiga tugas utama koperasi untuk membuat ekonomi pasar lebih “*fair*” di mata para pendukung koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut (Adhitya Wardhono, 2001) :

1. Koperasi mempunyai tugas utama untuk meningkatkan kapasitas produktif para anggotanya, sehingga mampu menghadapi persaingan pasar yang semata-mata menekankan pada norma efisiensi. Dengan demikian koperasi harus mampu menjadikan para anggotanya lebih produktif dan lebih efisien dengan berkoperasi ketimbang mereka harus berusaha sendiri. Hal ini terutama dimiliki oleh Koperasi-koperasi yang didirikan para produsen. Sehingga yang menjadi dasar pengorganisasian koperasi selalu berkaitan dengan kehematan skala (*economies of scale*) karena adanya sifat kekakuan satuan investasi (*indivisibility of investment*), jaminan kualitas termasuk semangat baru akan kesadaran lingkungan hidup dan lain-lainnya. Ciri utama dari koperasi produsen selalu bergerak di dataran pembelian bersama (input), pengolahan bersama (produk untuk nilai tambah) dan pemasaran bersama secara selektif sesuai struktur pasar komoditas (untuk memperbaiki posisi tawar dan menekan resiko).
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama mereka yang berpenghasilan tetap yang rentan terhadap gejolak harga. Koperasi yang memfokuskan pada tugas ini pada umumnya dilakukan oleh koperasi konsumen yang menekankan pada kerja sama pasar untuk mendapatkan harga yang kompetitif, jaminan penyediaan barang yang lebih terjamin untuk menghindari kelangkaan dan jaminan kualitas produk yang lebih baik. Pada saat ini koperasi konsumsi sudah sedemikian jauh hingga sampai pada tataran manfaat yang maya atau "intangibile" seperti kepemimpinan harga (Danish Brugsen di Denmark), produk ramah lingkungan (Koperasi

Konsumen di Jepang) sampai pada berbagi produk asuransi dan jasa-jasa untuk kenyamanan (*pleasure*) seperti wisata dan lain-lainnya.

3. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menjaga kelancaran arus pertukaran yang efisien. Gerakan koperasi sadar bahwa pertukaran adalah wahana terpenting dalam suatu perekonomian pasar agar setiap orang dapat meningkatkan kesejahteraannya secara optimal dan para produsen mendapat balas jasa yang wajar. Instrumen terpenting dari pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat antara rumah tangga produsen dan konsumen adalah alat pembayaran. Oleh karena itu sayap terpenting dari gerakan koperasi di dunia adalah koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam yang siap membantu para anggotanya dalam menjaga likuiditasnya untuk mendapatkan posisi tawar pasar yang terbaik.

Dengan demikian pada dasarnya hanya ada tiga macam jenis jurusan pengembangan koperasi yang dikenal di dunia yaitu koperasi para produsen (atau juga sering disebut koperasi produksi), koperasi para konsumen (koperasi konsumsi), dan koperasi kredit. Di dunia pilar gerakan koperasi di masing-masing negara yang sangat maju selalu dapat dikaitkan dengan tiga ciri utama koperasi dimaksud.

Menurut Imas Sumiati dkk (2018) sebagai bagian sejarah panjang pengenalan koperasi di Indonesia melalui pola "titipan" penjenisan koperasi ini kurang dikenal, yang membuat rancu hingga pada hari ini adalah kebanyakan koperasi dibedakan menurut kelompok basis pengembangan, apakah berdasar atas wilayah, atau dibedakan basis kelompok profesi dan kemasyarakatan pengembangan koperasi dan kombinasi kedua-duanya (wilayah dan basis kemasyarakatan). Dengan demikian

untuk memahami koperasi di Indonesia untuk sementara kita dapat menggunakan pengelompokan yang ada, namun dalam pemahaman peta kekuatan koperasi harus selalu kita kembalikan kepada ke tiga pilar jenis koperasi tersebut. Sebagai konsekuensinya kegiatan universal koperasi Indonesia pada dasarnya adalah “kredit” sementara koperasi produsen akan terbatas pada sektor-sektor yang menghadapi kegagalan pasar yang serius sedangkan koperasi konsumen yang murni (dari, oleh dan untuk anggota) belum mampu berkembang. Salah satu alasan obyektifnya adalah cukup besarnya sumbangan sektor informal sebagai bentuk lapangan kerja yang pada dasarnya mensubsidi sektor modern (pasar).

Bagi perekonomian Indonesia, kita perlu mengaitkan dengan konteks Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI) dan kedudukan koperasi. Dari sisi produksi pelaku ekonomi di Indonesia terdiri dari usaha negara, usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing dan usaha ekonomi rakyat dalam hal jumlah unit usaha. Sektor ekonomi rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bagaimana kontribusi masing-masing terhadap jumlah unit usaha, sumbangan terhadap produk *Domestic Bruto* (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Dari sisi konsumsi sektor ekonomi rakyat kita secara mudah dapat kita kenali dari sektor rumah tangga yang memegang posisi penting dalam menentukan permintaan domestik karena memegang porsi terbesar (65% 1998) dari pengeluaran agregat. Pengeluaran rumah tangga yang mencerminkan kehidupan sektor ekonomi rakyat dapat dilihat dari komposisi rumah tangga berdasarkan pengeluaran di mana secara umum masih mendominasi oleh kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi rakyat. Koperasi sebagai salah satu bentuk atau metoda menjalankan usaha merupakan salah satu bentuk atau organisasi perusahaan diantara para produsen kecil dan menengah di samping usaha perseroan milik negara, usaha swasta besar nasional maupun asing. Koperasi juga tidak mustahil sebagai salah satu di antara usaha besar sesuai kriteria Inpres 10/1999 yang menentukan usaha besar adalah usaha yang memiliki aset di atas sepuluh miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Di sektor produksi jasa koperasi adalah merupakan salah satu bentuk pengorganisasian pelayanan jasa keuangan sebagai lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Sementara di sisi konsumsi koperasi adalah merupakan organisasi para konsumen yang bergerak di dalam pelayanan jasa pemenuhan barang-barang konsumsi bagi rumah tangga. Dengan demikian koperasi konsumen sebenarnya lebih menyerupai perusahaan jasa bagi para konsumen (terutama kelompok menengah ke bawah) untuk menekan biaya transaksi dan mendapatkan nilai tambah serta jaminan pasar di sektor produksi. Dengan cara ini para konsumen dapat meningkatkan kesejahteraannya dan terjaga hak-haknya (Sri Edi Swasono, 1987).

Dalam konteks organisasi, koperasi mempunyai aturan dan cara tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu koperasi juga disebut sebagai gerakan, bahkan mempunyai kedudukan sebagai "observer" pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Koperasi yang usahanya mendasarkan pada prinsip pemilik adalah pengguna jasa koperasi telah merupakan suatu sistem gerakan dengan skala yang luas dan merupakan jaringan atas dasar kesamaan kepentingan dan aspirasi. Berbeda dengan koperasi yang segala nilai tambah yang diperoleh dialirkan

kembali kepada para anggotanya, maka di dunia juga mengenal adanya sistem lain yang mempunyai fungsi yang sama untuk menolong usaha kecil yaitu melalui sistem sub-kontrak. Usaha pada umumnya mampu menjadi lokomotif penarik bagi usaha kecil melalui wahana kemitraan. Oleh karena itu antara usaha menengah dan koperasi ini dapat mempunyai fungsi yang komplementer dalam memajukan usaha kecil. Pembagian tugas fungsional ini akan ditentukan oleh karakteristik fungsi produksi dari masing-masing kegiatan.

Satu fungsi lain dari koperasi, sebagai gerakan pendidikan dan gerakan memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek kelestarian lingkungan hidup koperasi juga mempunyai fungsi untuk mengangkat kemartabatan suatu masyarakat atau bangsa terutama dalam berekonomi. Karena sifat gerakan koperasi yang sering disebut sebagai "*quasipublic*", maka cukup banyak barang-barang publik yang dihasilkan oleh koperasi yang dalam jangka panjang mungkin tidak dikenal lagi bahwa itu adalah bagian dari hasil gerakan koperasi. Di Indonesia pada dasawarsa 1960an cukup banyak koperasi yang meninggalkan fasilitas pendidikan dan kesehatan atau bahkan Asuransi Bumi Putera 1912 sebagai "*mutual company*" adalah contoh bentuk akhir yang ideal dari koperasi yang berhasil. Perusahaan Mutual pada awalnya didirikan oleh para pendiri atau sponsor dengan prinsip dari, oleh dan untuk anggota adalah model sebuah koperasi yang biasa disebut dengan "*sponsored cooperative*" (Mohammad Hatta, 1985).

Dalam satu perekonomian pasar peran utama dari koperasi adalah menjadi wahana kerja sama pasar bagi para anggotanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal melalui kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian koperasi tidak untuk memaksimalkan nilai tambah bagi "perusahaan koperasi"

tetapi nilai tambah bagi para anggotanya. Oleh karena itu secara konseptual adalah “salah” menjadikan kontribusi dalam PDB sebagai ukuran keberhasilan koperasi. Indikator “eksistensi” koperasi dalam suatu perekonomian pasar adalah “pangsa pasar” koperasi dalam kegiatan atau sektor di mana jasa koperasi diperlukan. Dalam suatu kajian regional yang pernah dilakukan ukuran yang dianggap tepat adalah menempatkan koperasi di sektor-sektor “industri manufaktur” dan “tersier” atau jasa perdagangan (baik pembelian maupun distribusi) di mana koperasi menghasilkan nilai tambah.

Sementara itu, untuk mengetahui posisi perekonomian rakyat dalam perkembangan perekonomian nasional telah diangkat tiga indikator penting yaitu: (i). jumlah penyerapan tenaga kerja; (ii) nilai tambah untuk masing-masing sektor; dan (iii). Ekspor produk usaha kecil dan menengah. Koperasi sebagai badan usaha dapat berdiri sebagai usaha kecil, menengah atau bahkan besar sesuai skala bisnis atau “omzet” dan besarnya aset yang dimilikinya, demikian juga para anggota koperasi akan diperhitungkan dengan cara yang sama.

D. Proyeksi Peran Koperasi Ke Depan

Dalam konteks ini patut dilihat faktor daya saing produksi yang dihasilkan para anggota koperasi, sehingga daya saing koperasi tidaklah berdiri sendiri. Secara umum problematik peningkatan daya saing kita justru bukan terletak persoalan perbandingan dalam kelangkaan sumber daya, tetapi justru pada persoalan “kemampuan manajerial” dalam mengelola setiap lini proses dalam menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa di dalam dan luar negeri. Kelemahan “*competitive strength*” kita terletak pada rendahnya kemampuan kita untuk menghasilkan “*competitive advantage*” dalam suasana sebagian besar kegiatan produksi kita memiliki

“comparative advantage”. Jika demikian kondisi yang kita hadapi, maka fokus yang menjadi perhatian gerakan koperasi haruslah pada kemampuan memanfaatkan permintaan domestik, baik dalam pasar input produksi maupun pasar barang dan jasa untuk konsumsi (Kadir, 2020).

Dari pengalaman gerakan koperasi di Indonesia selama dua tahun proses leberalisasi perdagangan yang diikuti oleh rasionalisasi fasilitas bagi koperasi, justru memperlihatkan semakin intensifnya kontak terhadap dunia luar oleh gerakan koperasi, baik yang berkaitan dengan impor barang maupun ekspor produk-produk yang merupakan produk unggulan, terutama produk etnik (furniture, produk kerajinan) dan produk berbasis sumber alam. Kesulitan koperasi justru disebabkan oleh “instabilitas nilai tukar rupiah” ketimbang tidak adanya permintaan dan kemampuan pembiayaan. Dengan demikian liberalisasi perdagangan bukan suatu *momok* bagi koperasi untuk berkembang. Bahkan liberalisasi perdagangan yang dilakukan secara bertahap melalui penghapusan tata niaga dan penghapusan hambatan non-tarif telah memberikan kesempatan bagi koperasi untuk belajar, sehingga pada saat perdagangan bebas saat sekarang ini, koperasi Indonesia akan menjadi terbiasa dalam alam persaingan tersebut.

Problematika yang dihadapi ekonomi nasional kita pascakrisis adalah pengangguran yang meluas dan sensitifitas nilai tukar rupiah yang tinggi. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh koperasi, terutama yang bergerak dalam jasa pemasaran akan menjadi terkendala untuk berkembang. Hal ini antara lain karena banyaknya pencari kerja yang masuk ke dalam lapangan kerja yang mudah dan itu biasanya berada di sektor jasa perdagangan eceran barang kebutuhan pokok yang dari segi permintaan terjamin ada setiap hari mereka bahkan rela mendapatkan

margin yang kecil untuk sekedar bertahan hidup dalam sektor yang bersifat informal. Dalam situasi semacam ini kegiatan pemasaran oleh koperasi biasanya tidak kompetitif karena adanya faktor struktural yang menimbulkan perbedaan “biaya financial” dan “biaya ekonomi” (Mubyarto, 2002).

Pertumbuhan koperasi akan terletak pada sektor yang mempunyai karakteristik universitas kebutuhan individu yang tinggi, karena hanya kegiatan semacam ini yang mudah mencapai kelayakan ekonomi serta kemampuan jangkauan pelayanan yang meluas melampaui batas kesamaan kegiatan ekonomi. Dua pilar utama kemajuan koperasi dalam dasawarsa yang akan datang ini terletak pada “usaha jasa keuangan” dan “kegiatan pembelian bersama”. Dua kegiatan ini akan menjadi ciri kegiatan yang dapat menjadikan lokomotif kebangkitan koperasi di Indonesia untuk menjadi koperasi mandiri. Koperasi harus mulai semata-mata berhitung untuk pertimbangan bisnis bagi pelayanan kebutuhan anggota maupun bisnis yang dimandatkan anggota. Sesuai dengan semangat kebebasan koperasi dan rasionalisasi fasilitas, koperasi harus dapat bernegosiasi dan menolak terhadap tuntutan partisipasi koperasi yang tidak memberikan manfaat bagi anggotanya atau menimbulkan kerugian atau resiko kerugian terhadap koperasi.

Melihat posisi koperasi pada saat ini di mana aset koperasi sudah didominasi oleh kegiatan koperasi di bidang jasa keuangan, maka restrukturisasi kegiatan koperasi sebenarnya sudah berjalan dengan demikian akan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi secara agregat. Rasionalisasi kredit perbankan bagi sektor tertentu, terutama pertanian, akan membuka peluang baru bagi usaha di bidang jasa keuangan baik dalam kegiatan simpan pinjam maupun perbankan seperti BPR milik koperasi. Posisi struktur

usaha koperasi di Indonesia saat ini sangat kompotibal untuk menanggapi rasionalisasi kredit perbankan kepada petani dan belum menanggapi rasionalisasi kredit perbankan kepada petani dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sektor riil, kegiatan pembelian baik oleh koperasi produsen seperti KUD, Koperasi Pertanian, dan Koperasi Perikanan masih mendominasi kegiatan pembelian bersama pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Sementara koperasi konsumen sedang mempersiapkan kegiatan perkulakan atau pembelian bersamaan dan membangun jaringan, sehingga perannya untuk menjadi motor pertumbuhan koperasi semakin terlihat. Koperasi akan menikmati keuntungan dari dibukanya perdagangan luar negeri, sehingga arus penyediaan barang dan jasa baik untuk input maupun tujuan konsumsi akan semakin besar, sehingga dukungan pembiayaan atau ciptaan mekanisme pembiayaan bersama dalam bentuk konsorsium perlu dilakukan koperasi.

Prospek kegiatan koperasi di bidang agroindustri akan sangat tergantung pemulihan di sektor perbankan. Karena pada dasarnya di sektor produksi bahan baku telah siap seperti pada subsektor perkebunan terutama kelapa sawit. Di Jawa yang selama ini sebagian besar menjadi subsistem industri gula pasir tebu harus bekerja keras dengan merubah paradigma pengembangan agroindustri gula, dari orientasi agroindustri gula pasir menjagi agroindustri berbasis tebu. Dengan demikian harus berpikir untuk memisahkan diri dari infensiensi pabrik gula yang sesuai dengan rencana jangka panjang harus ditutup untuk direlokasi ke luar Jawa, ini berarti pabrik gula yang akan tinggal di Jawa hanyalah pabrik yang efisien yang mampu bertahan hidup dengan tanpa intervensi pemerintah untuk mendapatkan bahan baku. Sebaiknya gerakan koperasi melakukan tekanan untuk dapat ikut mengelola pabrik

gula bersama BUMN untuk menjamin stabilitas produksi gula oleh pabrik-pabrik yang benar-benar dinilai telah efisien (Zelhuda Shamsuddin, et.al., 2017).

Implementasi undang-undang bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan “Dinas” di tingkat provinsi yang disertai tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

E. Kebijakan yang Diperlukan untuk Mendukung Kemajuan Koperasi

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendestralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Di masing-masing daerah dapat mengembangkan pusat inovasi dan teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha, perbaikan kualitas produk dan informasi pasar. Pusat ini juga dapat dikaitkan dengan sistem jaringan informasi dan bisnis elektronika bagi pengembangan sistem distribusi koperasi. Pusat informasi inovasi dan pengembangan teknologi ini merupakan dukungan perkuatan bagi usaha kecil dan menengah yang sangat dibutuhkan sebagai dukungan *non-financial/Business Development Service*.

Tugas mendesak bagi koperasi pada saat ini adalah melakukan konsolidasi informasi keuangan koperasi yang berada di perbankan. Konsolidasi informasi ini akan memungkinkan gerakan koperasi mempunyai kekuatan untuk menghadapi perbankan misalnya melalui penyatuan kode rekening koperasi, pengelolaan lalu lintas informasi posisi keuangan untuk dapat menciptakan kekuatan negosiasi bagi penetapan "*gearing ratio*" bagi koperasi. Konsolidasi ini tetap menghormati kerahasiaan masing-masing koperasi tetapi memberikan kekuatan bersama untuk bernegosiasi dengan bank.

Koperasi-koperasi sekunder tingkat provinsi harus menjadi barisan terdepan untuk merintis pembelian bersama, terutama untuk produk-produk yang diimpor atau dibeli dari pabrik dan perusahaan besar. Untuk ekspor dapat dilakukan melalui koperasi atau melalui kerja sama dengan mengundang koperasi luar negeri untuk membeli di Indonesia. Hal ini untuk mempermudah proses belajar dan menghindarkan resiko penolakan akibat ketidakcocokan masalah standar.

F. Pemberdayaan Perdesaan: Koperasi dan Korporasi Agribisnis

Potensi pertanian Indonesia terutama karena besarnya potensi petani di dalamnya. Akan tetapi selama ini kita menyaksikan bahwa petani belum memiliki organisasi yang mampu meningkatkan posisi tawar dalam transaksi produktifnya. Berbeda dengan pedagang, pabrikan, eksportir dan lain pelaku lainnya, mereka telah memiliki perkumpulan atau asosiasi yang mendukung kebutuhan para anggotanya. Kalaupun para petani telah memiliki organisasi, umumnya organisasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan posisi tawarnya (Md. Ruhul Amin, 2014).

Institutional building sebagai prasyarat keharusan dalam pengembangan agribisnis yang bagian terbesar pelakunya petani “kecil dan gurem” adalah bangun koperasi dan koperasi agribisnis. Secara substansial, upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai langkah menuju rekonstruksi ulang dalam penguasaan dan akses sumberdaya produktif pertanian, terutama terkait dengan pengembangan agribisnis. Koperasi lebih merupakan *soft-step reconstruction*, sementara korporasi lebih merupakan rekonstruksi yang lebih “radikal”, atau *hard-step reconstruction* (Noer Soetrisno, 2001).

Menghadapi milenium ketiga di mana sistem pasar akan mendominasi dan persaingan menjadi semakin ketat, harus dicari bentuk kelembagaan yang tepat bagi pertanian kita. Bangun kelembagaan koperasi dipandang salah satu sosok yang tepat, mengingat entitas tersebut berciri sebagai asosiasi (perkumpulan orang/petani), badan usaha dan juga sebagai suatu gerakan yang bersifat *growth from within* (untuk melawan penindasan ekonomi dan ketidakadilan sistem pasar). Apabila mengamati sejarah lahirnya koperasi

yang tumbuh dari masyarakat kecil serta prinsip-prinsip yang dianutnya, maka terasa bahwa bangun organisasi inilah yang sesuai bagi petani dalam kegiatan pertaniannya, karena diharapkan mampu mendorong pengembangan usahanya, tidak saja dalam sosok sebagai lembaga ekonomi, akan tetapi merupakan lembaga sosial bagi para anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, semakin diyakini bahwa sosok kelembagaan koperasi adalah bangun organisasi yang tepat untuk pengembangan masyarakat pertanian, dan telah terbukti di beberapa negara mampu meningkatkan daya saing petani. Dengan sosok kelembagaan tersebut diharapkan berkembang kemampuan menangani aspek *economic of scale* dan *economies of scope* dalam sistem produksi, pengolahan, pemasaran secara keseluruhan. Misalnya, koperasi dapat mengkordinasikan suplai input secara lebih baik dan lebih murah. Demikian juga dengan *bargaining position* pada saat mereka akan menjual hasil produksinya. Pemerintah selaku fasilitator diharapkan dapat menumbuhkan kondisi yang mampu mendorong berkembangnya koperasi pertanian agar potensi besar yang mereka miliki dapat tumbuh menjadi kekuatan besar, sehingga kondisi harmonis baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi dapat kita capai (Hans. H. Munkner, 1980)

Jika menurut sejarahnya, koperasi di Indonesia memang berkembang penuh dengan romantika sebagai akibat "terlampau kuatnya" dukungan pemerintah dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga dalam banyak hal menjadikan sosok koperasi di Indonesia sempat "kehilangan" jati dirinya. Di kalangan masyarakat sendiri, masih beragam pendapat tentang eksistensi koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia saat ini. Sebagian *apatis*, sehingga memerlukan pengkajian ulang mengenai eksistensi koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia.

Sebagian lain memandang koperasi sebagai *entitas* perlu dikembangkan, walaupun seadanya saja. Sementara itu, berbagai pendapat lain merasa penting untuk mengembangkan koperasi sebagai sosok kelembagaan ekonomi yang kokoh bagi pemberdayaan masyarakat. Pendapat terakhir ini meyakini bahwa koperasi sebagai upaya kelembagaan dapat merupakan instrument bagi upaya restrukturisasi ekonomi pertanian, untuk mewujudkan keseimbangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi pertanian. Ada dua argument yang melandasi pendapat ini, yaitu (a) secara kolektif, koperasi dapat penghimpun para pelaku ekonomi pertanian dalam menjual produk-produk yang dihasilkannya dengan posisi tawar yang baik, dan (b) koperasi secara organisasi dapat menjadi wadah yang bertanggungjawab bagi kebutuhan pengadaan saprotan maupun kebutuhan lain secara bertanggungjawab pula (Dulfer, 1979).

Walaupun demikian, ke depan, usaha-usaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bagi pengembangan agribisnis di perdesaan tahap awal tetap masih membutuhkan “ulur tangan” (kebijakan pemihakan) pemerintah secara langsung, akan tetapi dengan pengertian bentuk “ulur tangan” pemerintah tersebut harus ditempatkan dalam upaya pengembangan iklim berusaha yang sesuai. Misalnya, pengembangan program dan metoda penyuluhan pertanian yang diarahkan kepada upaya pengembangan orientasi dan kemampuan kewirausahaan, yang lebih mencakup substansi manajemen usaha dan penyesuaian terhadap materi-materi di bidang produksi dan pemasaran. Dalam hubungan ini maka pola magang dan sistem pencangkokan manajer dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan.

Masalah kalangan kapital yang seringkali menjadi kendala pengembangan agribisnis memerlukan kebijakan secara lebih hati-hati. Pemberian kredit yang murah

seringkali justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan kegiatan usaha dalam jangka panjang, jika tidak diikuti dengan upaya-upaya pengendalian yang baik. Alternatif yang dinilai lebih sesuai adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis yang menyediakan fasilitas kredit yang mudah, yaitu kredit yang memiliki kemudahan dalam perolehannya, kesesuaian dalam jumlah, waktu serta metode peminjaman dan pengembaliannya. Di samping itu pemberian kredit tersebut perlu diatur sedemikian sehingga kemungkinan re-investasi dan keberhasilan usaha dapat lebih terjamin. Dalam hal ini bentuk *supervised credit* dapat menjadi alternatif model pemberian kredit. Banyak contoh sukses koperasi kredit di bidang agribisnis yang kuat dan besar, seperti *Credit Agricole* di Perancis, Rabobank di Belanda, dan lain-lain.

Pengembangan agribisnis dengan agro-industri perdesaan juga perlu didukung oleh kelembagaan yang sesuai, mengingat kerakteristiknya yang sangat beragam. Dalam kelembagaan usaha tersebut misalnya, perlu dikaji kombinasi optimal dari penguasaan dan pemanfaatan skala usaha dengan efisiensi unit usaha, sesuai dengan sifat kegiatan yang dilakukan. Salah satu contoh, jika kegiatan, agroindustri memang akan lebih efisien apabila dilakukan dalam skala yang relatif kecil, maka pengembangan kegiatan usaha individual perlu didorong. Akan tetapi untuk kegiatan pengangkutan yang memerlukan skala kegiatan yang lebih besar, perlu dipertimbangkan suatu unit kegiatan yang sesuai pula. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya kondisi, di mana kegiatan agroindustri dilakukan secara individual (tidak harus dipaksakan berada dalam unit usaha koperasi dalam bidang pengangkutan. Hal-hal semacam memerlukan penelaahan lebih lanjut secara mendalam, dikaitkan dengan sosok spesifik unit usaha yang dikembangkan

dalam koperasi agribisnis tersebut (Zelhuda Shamsuddin, et.al., 2017).

Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pengembangan agribisnis/agroindustri di tingkat lokalita (kawasan perdesaan) akan dijumpai pula kondisi yang sangat beragam baik dari segi agroekosistem, sarana dan prasarana maupu kondisi sosial budayanya. Keragaman-keragaman tersebut jelas menghendaki rancangan bangun kelembagaan yang mampu teknokogi. Dalam hal ini, beberapa contoh berkembangnya model-model kelembagaan agribisnis seperti SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan, Desa Cerdas Teknologi, Gerakan Kemitraan, Inkubator, Klinik Tani/Agribisnis, Asosiasi-Asosiasi Petani, pemanfaatan tenaga-tenaga perekayasa professional yang berfungsi sebagai konsultan dan nara sumber, harus dipandang sebagai langkah esensial untuk mengakumulasikan modal sosial (*social capital*) yang harus terus-menurus didorong sebagai embiro dalam mewujudkan *institutional building* yang akan memperkokoh posisi tawar petani dalam agribisnis (Mubyarto, 2016).

Pada saat ini, struktur pasar produk-produk pertanian bersifat oligopoli, dalam wujudnya sebagai perusahaan multinasional, dengan kekuatan luar biasa besarnya. Harga-harga produk pertanian dunia dikondisikan oleh keputusan-keputusan perusahaan multinasional ini. Industrilisasi pertanian seharusnya sejalan dengan pengembangan kemampuan petani untuk beradaptasi dengan perusahaan-perusahaan multi nasional, sehingga menjadi medan untuk mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan petani Indonesia.

Terkendalanya petani akibat masalah teknis dan akses sebagaimana selama ini merupakan pembatas utama bagi peningkatan posisi tawarnya, memerlukan hadirnya

kelembagaan yang dapat mengatasi hal itu. Sebagai individu, petani sangat terbatas dalam aspek-aspek *property rights*, batas-batas yurisdiksi dan aturan representasi sebagai individual. Misalnya, masalah-masalah teknis seperti skala ekonomi, dan ketiadaan akses sebagaimana dimiliki oleh individu pengusaha dalam wujud institusi perusahaan.

Dalam wujud perusahaan, seseorang atau sekelompok orang, memiliki *property rights*, batas-batas yurisdiksi dan aturan representasi yang lebih luas dari pada sebagai individu manusia. Institusi dalam wujud perusahaan memperluas kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan usaha/kerja, martabat dan kesejahteraan petani. Pemikiran ini bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum banyak menghasilkan kinerja petani yang lebih baik, seperti yang terjadi di negara-negara maju.

Korporasi petani dalam bidang agribisnis telah menjadi wacana dan diskusi publik sebagai suatu *institutional building*. Korporasi masyarakat (petani agribisnis) pada dasarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat pada dasarnya akan menjadi kuat manakala memanfaatkan segenap *social capital* yang ada pada masyarakat tersebut. Contoh yang dikemukakan adalah pelajaran dari pengalaman empirik perusahaan American Crystal Sugar Company (ACSC) yang dibeli oleh 1300 petani pada tahun 1973 melalui NYSE senilai US\$ 86 juta. Sejak saat itu, ACSC berkembang pesat, baik dalam areal, produksi, rendemen, kepemilikan petani, dan *joint ventures*. Demikian pula, pelajaran yang dikembangkan di Malaysia dalam restrukturisasi kepemilikan saham melalui skema Amanah Saham Nasional tampaknya dapat menjadi bahan pengkajian (Muhammad Halilintar, 2018).

Korporasi petani sebagai suatu kelembagaan ekonomi misalnya, adalah suatu lembaga/perusahaan

yang dimiliki oleh petani. Dalam sosok tersebut, kepemilikan petani ini dinyatakan dalam bentuk kepemilikan individual dan kolektif selalui lembaga koperasi sekaligus. Kepemilikan yang sifatnya individual dirancang agar petani secara individual langsung dapat berpartisipasi dalam pengembangan kesempatan-kesempatan dan memanfaatkannya.

Sedangkan kepemilikan kolektif ditujukan agar organisasi petani dapat menjalankan fungsinya. Korporasi petani pada dasarnya merupakan kumpulan petani sekaligus juga kumpulan modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta modal sosial seperti semangat serta dukungan dari para pihak yang memiliki kesadaran untuk terwujudnya industrialisasi pertanian di Indonesia.

Korporasi petani pada dasarnya harus berkembang dan tersebar menurut persebaran komoditas-komoditas pertanian. Fungsi utama daripadanya adalah sebagai berikut: (i) pelayanan jasa desain industri di setiap wilayah pengembangan (agropolitan); (ii) pelayanan jasa "*brokerag*" dalam permodalan dan seleksi teknologi, (iii) pelayanan jasa pelatihan dan pengembangan produk serta manajemen industri, (iv) pemasaran produk, (v) negosiasi-negosiasi atau *lobby* dengan para pihak terkait, khususnya Pemerintah (Muhammad Halilintar, 2018).

Kunci awal dari semua proses industrilisasi tersebut adalah pengembangan budaya industri dalam masyarakat petani. Dengan berkembangnya budaya industri ini, petani terbuka kesadarannya untuk menentukan prioritas-prioritas yang sesuai dengan dirinya dan memiliki potensi pasar yang baik. Selanjutnya, atas dasar ini maka dikembangkan pentahapan pengembangan institusi industrilisasi sesuai dengan tahapan yang diperlukan. Apabila ini berhasil maka tahap selanjutnya adalah tahap ekspansi. Dalam semua proses ini diperlukan

pendampingan atau dukungan dari kalangan professional dalam bidang industri pertanian.

Berdasarkan konstruksi pikiran-pikiran di atas, dipahami bahwa membangun pertanian, agribisnis di perdesaan yang dikemukakan pada dasarnya mengembangkan upaya kelembagaan (*institutional building*). Institusi atau kelembagaan adalah suatu *rules* yang merupakan produk dari nilai, yang diharapkan terus berevolusi dan menjadi bagian dari budaya (*culture*). Hal itu merupakan prasyarat keharusan (*necessary condition*) untuk menjadi “kunci pembuka” pengembangan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkeadilan. Secara operasional, sosok koperasi agribisnis dan koperasi (masyarakat, petani) semacam Badan Usaha Milik Petani dipandang sebagai bangun kelembagaan yang mampu berperan dalam mewujudkan pembangunan pertanian sebagaimana yang divisikan.

Mewujudkan upaya di atas tidaklah mudah dan sederhana. Karakteristik, keunikan dan keragaman yang tinggi pada berbagai kegiatan agribisnis di satu pihak, serta dinamika permintaan dan konsumsi yang sangat tinggi memerlukan manajemen pengelolaan yang terintegrasi sebagai suatu syarat kecukupan (*suffiecient condition*).

Diyakini, kunci utama untuk dapat memanfaatkan segenap *social capital* yang ada pada masyarakat adalah terletak pada kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana membangun SDM yang ada (dengan latar belakang dan kualitas yang berbeda-beda) menjadi suatu *team work* yang harmonis. Banyak persoalan inefisiensi kelembagaan yang disebabkan oleh ketidak-harmonisan SDM yang terlibat di dalamnya akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa bangun kelembagaan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik masyarakat desa kita adalah Koperasi.

G. Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Wilayah Otonomi

Menurut Todaro (1984) bahwa ekonomi rakyat pada hakekatnya berada di daerah otonom dan daerah otonom mempunyai kepentingan sama untuk melangsungkan status otonomi secara mandiri. Oleh karena itu dengan menempatkan daerah otonom sebagai basis penilaian untuk menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat akan mempermudah menemukan persoalan secara tepat serta menghindarkan diri dari perdebatan makro yang tidak perlu. Di banyak negara seperti Kanada pengaturan mengenai kredit pertanian, koperasi dan lain-lain justru ditempatkan pada pengaturan oleh daerah melalui *local government act* untuk memberikan perhatian terhadap masalah khusus yang perlu diberikan pada sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus. Daerah otonom memerlukan lembaga-lembaga lokal, terutama lembaga keuangan yang dapat menahan arus aliran sumberdaya (keuangan) ke luar daerah dan sekaligus membangun kekuatan pengimbangan untuk menarik investasi dalam rangka meningkatkan kepada investasi per satuan unit usaha (*to increase investment density*). Hal ini pada gilirannya akan menjamin arus yang adil dalam sumberdaya keuangan antara daerah dengan pusat-pusat penarikan. Tesis dasar yang hendak diuji dan diwujudkan adalah dengan penguatan sumberdaya lokal pada basis rakyat yang luas akan memperkuat posisi tawar nasional.

Pemberdayaan ekonomi daerah berarti gerakan menyeluruh untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Unit analisis makro diturunkan menjadi tingkat daerah otonom dan untuk sementara, kita lepaskan dari indikator makro perekonomian yang lazim digunakan seperti inflasi, nilai tukar dan pertumbuhan. Dalam hal ini kita lebih mengutamakan analisis pada unit mikro tentang jumlah orang yang termajinalisasi oleh proses

pertumbuhan/pembangunan atau perubahan lainnya yang tidak mampu ditanggapi oleh individu tersebut yang menyerupai indikator sosial yang lazim diterima dan mempunyai kemampuan komparasi. Sebagai contoh indikator yang paling mendasar adalah jumlah penduduk miskin, penduduk kurang gizi, jumlah penduduk yang tidak usia muda yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kesemuanya ini diturunkan dari tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan UUD yaitu meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa. Cara pandang ini akan lebih memudahkan kesalahpahaman dan perdebatan persoalan indikator kemajuan ekonomi yang akhirnya berlanjut pada masalah sistem ekonomi dan realitas sistem pasar yang kita anut, oleh karena itu fokus agenda kita adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dalam sistem pasar perekonomian Indonesia.

Secara teoritis daerah merupakan basis penciptaan surplus karena tingkat konsumsi rendah, investasi rendah sementara pada akhir-akhir ini menjadi penerima *transfer netto* yang besar. Dalam setiap pengalaman pembangunan sektor tradisional (pertanian/primer) selalu menjadi penyedia tabungan bagi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu *platform* dasar penguatan ekonomi rakyat yang berarti penguatan ekonomi rakyat yang berarti penguatan ekonomi daerah adalah menjamin aliran modal dari daerah yang tidak bias pada pengurusan sumber daya daerah. Hal ini diyakini hanya dapat dikerjakan dengan penguatan basis lembaga keuangan, baik modern maupun tradisional serta bank maupun bukan bank. Untuk perbankan, jenjang terendah bank basis daerah yang kita miliki baru pada tingkat provinsi dengan bank pembangunan daerah untuk bank umum sehingga arus pengurusan dana ke pusat-pusat kota masih belum dapat dihindarkan, meskipun masih lebih berorientasi ke daerah dibanding yang terpusat di ibukota. Bank-bank yang dapat dikategorikan mempunyai

perhatian kewilayahan karena kedudukannya masih sangat terbatas dan tidak kuat. Di luar bank umum terdapat Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai basis yang lebih lokal pada daerah otonom. Tujuan utama penataan lembaga keuangan daerah adalah untuk menjamin aliran modal yang adil dan lebih berorientasi pada kesempatan daerah agar percepatan penyediaan layanan keuangan secara masif dan berorientasi pasar dapat segera ditumbuhkan. Pada gilirannya upaya ini akan meningkatkan kedalaman derajat monetisasi pedesaan dan tidak hanya dalam arti agregat tetapi juga kualitas transaksi.

Dalam penataan keuangan di daerah basis pelayanan terluas dapat diletakkan pada lembaga keuangan mikro, terutama koperasi yang sudah jelas kedudukan entitas legal, sistem dan mekanisme serta refensi pengalaman sukses baik dari dalam maupun luar negeri. Daerah otonom menjadi unit pusat pengembangan koperasi kredit sehingga terdapat semacam *"district's central bank of microcredit/cooperatives"*. Tugas lembaga ini tiada lain adalah dalam hal pengaturan likuiditas dan pengawasan terhadap koperasi primer anggotanya. Proses kapitalisasi koperasi oleh pemerintah (pemerintah daerah) dapat dijalankan melalui lembaga ini. Lembaga ini dapat berbentuk koperasi pusat dan dalam pendiriannya tidak diijinkan memberikan pinjaman kepada siapapun kecuali anggotanya, sehingga keanggotaan akan mengikat syarat kualitas pengelolaan koperasi yang disyaratkan oleh koperasi pusat. Dalam hal daerah ingin mengikut sertakan modalnya dapat dalam bentuk "modal penyertaan" dalam format UU 25/1992 atau "saham" sesuai pemikiran baru yang berkembang. Basis pelayanan kredit melalui koperasi ini dapat dijalankan dengan kerangka pengembangan yang luas dan tidak selalu terikat dengan pembagian wilayah administratif seperti desa, kecamatan dan sebagainya

namun dapat diselenggarakan secara kompetitif pada tempat kedudukannya. Untuk maksud efisiensi dan penguatan antara daerah kabupaten dan kota yang berada dalam suatu kawasan pemusatan koperasi disatukan saja. Masing-masing daerah kepentingannya dapat ditampung dalam suatu Dewan Pengarah yang mewakili seluruh *stakeholder* bagi pengembangan koperasi atau semacam *area cooperative development council* (Detha Riristuningsia dkk, 2017).

Koperasi-koperasi yang lain yang sudah ada seyogyanya didorong untuk senantiasa melakukan restrukturisasi menuju basis bisnis dan keanggotaan yang kokoh. Bagi koperasi yang dominasi kegiatannya berat pada suatu kegiatan simpan pinjam sekaligus diarahkan menjadi koperasi tunggal usaha keuangan. Jenis koperasi lain dikembangkan pada arah koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa sesuai kebutuhan dan atas dasar prinsip kerja sama pasar pada lapangan permainan yang sama. Dasar-dasar pengembangan ini selalu atas dasar sukarela dan kesepakatan koperasi yang bersangkutan, karena lingkungan peraturan perundangan juga sedang berubah yang menuju kepada tiga hal: penyetaraan badan usaha dan badan hukum koperasi; pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan prinsip dan nilai koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakter dan konten sosial, penggarisan peran yang jelas hubungan antara pemerintah dan gerakan koperasi serta masyarakat sebagai *stakeholder*.

Komponen kedua yang perlu dikembangkan adalah pengerahan dana murah masyarakat secara luas melalui pengembangan berbagai sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan (kelaparan/kurang gizi), kesehatan dan pendidikan. Hal ini antara lain melalui pengembangan sistem jaminan sosial bagi penduduk miskin dan para pekerja di sektor informal, termasuk

lembaga Amil Zakat yang dilaksanakan masyarakat. Disarankan sistem ini dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial mikro atau *micro social insurance system* yang terbukti telah sukses di banyak negara. Sistem ini akan melindungi rakyat dan pelaku ekonomi rakyat dari ketidakpastian karena tidak dapat bekerja. Dalam sistem syariah (baca: bagi hasil) sistem ini dipandang lebih menjamin kepastian jangka panjang dan dapat dikaitkan dengan gerakan kembali untuk mengurangi resiko sistem financial yang ada misalnya pengenalan kembali standar emas dalam bentuk *dinar* dan *dirham* sebagai instrument pembayaran zakat atau tabungan jangka panjang seperti tabungan haji dan lain-lain.

Indonesia pada dasarnya tidak menghadapi ancaman ketahanan pangan dalam arti penyediaan tetapi justru diprediksikan menghadapi ancaman ketahanan pangan dalam arti ketahanan daya beli (akses) yang merata. Pertanian di daerah (perdesaan) dengan demikian harus diorientasikan pada optimalisasi mikro pada usaha tani untuk meningkatkan pendapatan petani baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian program secara makro harus didasarkan pada landasan keunggulan komparatif dan prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepentingan jangka panjang harus dipikirkan terutama ketersediaan dana jangka panjang yang murah. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan program pengembangan dan penciptaan aset masyarakat luas.

Salah satu kegiatan yang dapat memenuhi maksud ini adalah pengembangan *agroindustsy* dan *agroforetry* berbasis perdesaan untuk mendukung kelangsungan ekosistem yang baik disertai dukungan untuk menjaga kelangsungan industri kerajinan rakyat di bidang manufacturing. Masing-masing daerah dan perdesaan misalnya, dapat membuat gerakan menanam sejuta pohon

khas daerah seperti: jati, mahoni, cendana, meranti, eboni dan lain-lain. Perkebunan hutan rakyat ini bila disertai dengan peningkatan dokumentasi persyaratan legal (sertifikat tanah, notarisasi perjanjian kerja sama dan sertifikasi apresiasi nilai oleh lembaga yang kompeten) akan menambah nilai aset dan kemampuan sektor perdesaan untuk menarik dana perbankan dari luar oleh wirausaha di desa. Sektor kegiatan lain yang secara kultural diyakini oleh masyarakat sebagai instrumen tabungan dan penciptaan aset adalah usaha-ternak, karena usaha ternak dipandang sebagai pilar lain penciptaan aset masyarakat menuju pertanian berkelanjutan, perbaikan mutu gizi dan dapat dikerjakan bersama dengan kegiatan *agroforestry*. Perbaikan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, sistem jaminan kesehatan dan beasiswa untuk program pendidikan adalah termasuk dalam empat program yang dapat dijadikan instrumen untuk *dept swap*. Dengan demikian kita juga membangun kemampuan masyarakat untuk menyangga masa depan bangsa dalam membayar hutang atau membeli asset negara yang terjual dan berkepentingan langsung dengan nasib penduduk seperti perkebunan, prasarana atau lembaga keuangan (Sibuea, et.al., 2021).

Sebagai suatu gerakan, sebaiknya kegiatan dilakukan berangkat dari daerah (perdesaan) dan bekerja sama dengan daerah. Sebagai komponen atau bagian dari inisiatip sebuah gerakan, maka dianjurkan untuk membangun kerja sama dengan daerah dan gerakan ini juga dapat dimulai dengan skala masyarakat. Model-model keberhasilan perlu diciptakan dengan daerah-daerah terpilih, karena pada dasarnya hal ini adalah merupakan inisiasi dari pembangunan wilayah (*regional development*). Karena ini akan kepentingan semua lapisan masyarakat maka pegiat lembaga kemasyarakatan, gerakan koperasi, dunia perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah serta

politisi harus diyakinkan dan menjadikannya sebagai agenda bersama mereka. Kata kuncinya adalah: “perkuat daerah dalam kerangka pembangunan wilayah, kelembagaan dan lembaga keuangan mikro, penciptaan aset dan kemandirian” masyarakat, daerah (perdesaan) dan bangsa.

Para penggagas dan pendukung dari gerakan semacam ini dapat melaporkan pengalamannya dari masing-masing contoh, baik pada skala mikro hingga pada skala daerah. Oleh karena itu pertemuan periodik tahunan dapat diprogramkan bersama kegiatan gerakan lainnya untuk memberikan evaluasi. Media semacam ini secara teratur akan membangkitkan semangat baru untuk memperbaharui, memperbaiki dan meningkatkan gerakan ini. Dalam jangka lima tahunan sebuah konferensi besar perlu digelar untuk mendokumentasi dan sekaligus membuat proyeksi jangka panjang sepuluh atau duapuluh tahun mendatang, apakah gerakan ini telah melahirkan secercah harapan baru bagi Indonesia yang bebas kebodohan, kemiskinan dan rakyat mampu membebaskan negeri ini dari hutang.

Pada akhirnya wujud dari politik pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial akan ditentukan pada tingkat pelaksanaannya. Tanpa mempersoalkan sesuatu yang telah disepakati bahwa perekonomian Indonesia dibangun melalui mekanisme pasar yang sehat, maka peran perwujudan keadilan sosial diatur dalam suatu sistem hukum yang merupakan produk kesepakatan politik atas dasar demokrasi. Di antara kedaulatan politik dan kedaulatan pasar dalam kenyataannya masih menyisakan suatu tatanan sosial yang dapat saja kondusif, belum siap hingga perlunya menampung pranata khusus dalam sistem pasar. Oleh karena itu demokrasi ekonomi akan mampu membawa pada hasil pembangunan pada tingkat realitas bila menampung dasar-dasar dimaksud

serta menampung keikutsertaan segenap lapisan masyarakat. Kebinekaan budaya mengajarkan pada keharusan untuk melihat pada titik akar yang paling dekat dengan mereka, oleh karena itu daerah dapat menjadi dasar untuk mencapai keragaman pendekatan dalam satu tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat.

F. Simpulan

1. Dalam upaya pembangunan nasional berkelanjutan terutama terkait dengan pembangunan sektor pertanian maka sesungguhnya sangat diperlukan instrumen atau *software* terbaik berupa organisasi atau institusi atau kelembagaan yang seharusnya konsisten menguatkan petani yang kebanyakan merupakan petani gurem. Kelembagaan yang kuat akan mampu menghantarkan petani bersaing dengan korporasi bisnis lain mengingat karakteristik masyarakat desa yang sangat erat dengan prinsip kegotongroyongannya. Jika petani dapat dipersatukan dan di-*manage* dalam sebuah lembaga maka akan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat menjanjikan ke depannya.
2. Lembaga ekonomi pertanian yang paling representatif yang dapat menyahuti aspirasi kearifan lokal yang dimiliki petani Indonesia adalah koperasi. Sesuai dengan semangat konstitusi yang mengamanatkan bahwa bangun koperasi adalah merupakan sokoguru perekonomian nasional yang kongruen dengan lembaga ekonomi pertanian di desa. Koperasi ini adalah merupakan bagian integral dari lembaga UMKM yang dikenal dalam pembangunan kontemporer.
3. Secara faktual bahwa eksistensi koperasi berbasis agribisnis saat ini sangat memprihatinkan karena kontribusinya terhadap pembangunan masih sangat

kecil dan belum terasa sama sekali. Seakan-akan hidup segenap mata tak mau. Padahal secara kuantitatif jumlah organisasi koperasi dan jumlah anggota koperasi ini sangat besar namun secara kualitatif malah sangat kecil, sesuatu yang sangat paradoks dan memerlukan solusi terbaik. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, modal dan keberpihakan otoritas pemerintah yang sangat minim semakin memperburuk dan memerosotkan kinerja dari koperasi.

4. Meski kontribusi lembaga ekonomi pertanian (koperasi) masih sangat minim akan tetapi lembaga koperasi ini masih sangat dirindukan bahkan akan tetap dirindukan. Mengapa demikian? Karena memang konstruksi lembaga koperasi merupakan sesuatu yang unik yang khas dan yang paling mendekati atau sesuai dengan karakteristik masyarakat tani di desa. Bahkan sebenarnya pemerintah sendiri pun amat sangat tergantung dan memerlukan keberadaan koperasi dalam menyukseskan pembangunan dan sebagai "alat argumentatif" bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Namun pemerintah sepertinya kurang serius dan peduli dengan keberadaan koperasi sehingga terkesan tak berpihak kepada koperasi.
5. Pembangunan pertanian terkini adalah merupakan pembangunan yang berwawasan agribisnis. Pembangunan pertanian berbeda dengan agribisnis. Pembangunan agribisnis merupakan pembangunan secara holistik yang menyangkut pembangunan semua aspek pertanian yaitu agroinput (agrosaprodi), agroproduk (agronomi), agroindustri (agroteknik), agrobisnis (agromarketing) dan agrosupport (agropenunjang) yang seyogyanya

semua aspek ini mampu dijawab dan diimplementasikan melalui bangun lembaga ekonomi koperasi.

6. Revitalisasi lembaga ekonomi pertanian koperasi ini harus lebih mengarah kepada bagaimana upaya pemberdayaannya dengan mengkombinasikan dengan model atau prinsip korporasi sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing koperasi. Bagi pelaku dan anggota koperasi akan membangkitkan semangat dan keinginan untuk berprestasi sedemikian rupa dengan adanya iklim korporasi dalam berkoperasi, tentunya dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan teknologi modern terkini. Fahaman korporasi dalam berkoperasi ini menjadi senjata terbaik dalam meningkatkan harkat, derajat, martabat dan daya saing koperasi dengan bentuk bisnis korporat lainnya.
7. *Institutional building* merupakan alternatif terbaik dalam upaya membangun pertanian yang adil dan modern. Pembangunan pertanian dan perdesaan yang lebih beradab melalui pembangunan kelembagaan ini merupakan pengejawantahan daripada semangat kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tani dan semangat keunikan kekhasan karakter yang dimiliki oleh petani Indonesia. Pendampingan terhadap lembaga ekonomi ini harus dijalankan dengan penuh komitmen dan konsisten oleh pemerintah dan privat, karena merupakan syarat mutlak dalam konteks pemberdayaan.-

G. Daftar Pustaka

- Adhitya Wardhono. (2001). Koperasi: Antara Sanjungan dan Keterpurukan. Artikel - Th. I - No. 4 - Juni.
- A.T. Mosher. (1969). *Getting Agricultural Moving*. Frederick A. Praeger, Inc. Publisher, New York.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indonesia Dalam Angka*.
- Bahri Nurdin dan Yusdy Achmad. (1987). *Beberapa Aspek historis Perkembangan Koperasi Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Baswir, Revrison. (2000). *Koperasi Indonesia*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bayu Krisnamurthi. (2002). Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangab Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. I - No. 4 - Juni 2002.
- Detha Riristuningsia, Wahyunadi, Iwan Harsono. (2017). *Public Participation in Rural Development Planning*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9 (1).
- Dhananjay Apparao, Elena Garnevska, Nicola Shadbolt. (2019). Examining commitment, heterogeneity and social capital within the membership base of agricultural co-operatives. A conceptual framework
- Dulfer, E. ed. (1979). *Cooperative*. London: Quiler Press.
- G. Kartasapoetra, dkk. (1991). *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Rineka Cipta Jakarta.
- Ghofirin. (2021). Permasalahan Ekonomi Koperasi Indonesia Kontemporer. *Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unusa Surabaya*.
- Hans. H. Munkner. (1980). *Cooperative Ideas, Principles and Practices*, Marborg Germany.
- Ibnoe Soedjono. (2003). *Instrumen Pengembangan Koperasi*. LSP2I, Jakarta.
- ICA. (1995). *Farmers Organizations and Rural Cooperatives*. International Cooperative Alliance (ICA) Communication, May 1995 ([//gopher.adp.wisc.edu](http://gopher.adp.wisc.edu): 70).

- Imas Sumiati, Yayan Mulyana, Tine Ratna Poerwantika. (2018). The Impact of Organization Design on Work Performance of Cooperative Department, Small and Medium Enterprises Business of Trade in Bandung City. *Jurnal Sains Sosial and Humaniora*.
- Kadir, Hainim. Yusbar Yusuf. (2020). "*Optimalisasi Pengaruh dan Eksistensi kaoperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Daerah*". Vol.2. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Md. Ruhul Amin, Mohammed Mahin Uddin (2014). Economic Impacts of Co-operative Societies: An Empirical Study *Jurnal Socrates*. Vol. 2 No 2 (2014).
- Mubyarto. (2001). Prospek Otonomi daerah dan perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Mubyarto. (2002). Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi. Artikel Tahun I Nomor 6 Agustus 2002.
- Mubyarto. (2016). Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta
- Mudrajad Kuncoro. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga, Jakarta.
- Muhammad Halilintar (2018). Cooperatives and Economic Growth in Indonesia. *European Research Studies Journal Volume XXI, Issue 2*, pp. 611-622.
- Mohammad Hatta. (1985). *Membangun Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Idayu Press.
- Nasution, Muslimin. (1990). *Keragaan Koperasi Unit Desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan*. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ninik Widyanti. (1991). *Manajemen Koperasi, Rineka Cipta* Jakarta..
- Noer Soetrisno. (2001). *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Intrans, Jakarta.

- Panji Anogoro dan Ninik Widiyanti. (2003). *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta.
- Ropke, Jochen. (1992). *The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries*. Marburg.
- Soetrisno, et. al. (2019). Strategy and Policy for Strengthening the Agricultural Cooperative Business in East Java, Indonesia. *Widyagama, Journal of Socioeconomics and Development* Vol 2, No 1, April 2019, 12 - 22. DOI: 10.31328/jsed.v2i1.886
- Sabrina Engert, Romana Rauter, Rupert J. Baumgartner (2016). Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review. *Journal of Cleaner Production* 112 (2016) 2833e2850. Institute of Systems Sciences, Innovation and Sustainability Research, University of Graz, Merangasse 18/1, 8010 Graz, Austria
- Sibuea, Muhammad Buchari. (2011). *Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Pembangunan Ekonomi Desa: Kajian Kes Tentang Pengurusan Petani di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Disertasi*. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Sibuea, M. B. (2020). *Sumber Daya Manusia Pertanian Menghadapi Era Globalisasi dan Pandemi Covid-19. Book Chapter Covid-19 dan Kampus Merdeka di Era New Normal Ditinjau dari Perspektif Ilmu Pengetahuan*. UMSU Press.
- Sibuea, M. B. , Yudha Andriansyah Putra, Faiz Ahmad Sibuea. (2021). *Development Models of Agribusiness Based Economic Institution to Improve The Community Performance and Income in Mangrove Forest Area. Proceeding The 1st International Conference Business, Agribusiness, &Agriculture*. Medan Area University.
- Sibuea, M. B. and F A Sibuea. (2018). *Contribution of village cooperation unit in improving farmers incomes*.

- International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security IOP Publishing. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 122 (2018) 012021 doi :10.1088/1755-1315/122/1/012021
- Sri Edi Swasono. (1987). *Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Todaro, M.D. 1984. *Economic Development in The Third World*. Second Edition. London: Longman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Wahyu Sukotjo. (1987). *Koperasi Indonesia: Bersama Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam Kebersamaan*, UI Press, Jakarta.
- Zelhuda Shamsuddin, Abdul Ghafar Ismail, Suraya Mahmood, Md Faruk Abdullah. (2017). Determinants of Agricultural Cooperative Performance Using Financial Ratio. *International Journal of Business and Technopreneurship Volume 7, No. 3, Oct 2017* [385-396].

RIWAYAT PENULIS



I. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Porsea Tobasa, 04 November 1965
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Nama Istri : Dina Andika Bastian Badrys
8. Nama Anak Pertama : Faiz Ahmad Sibuea, SP, M.Si.
9. Nama Anak Kedua : Anisah Muthmainnah Sibuea, SKG.
10. Nama Anak Ketiga : Teguh Imani Sibuea
11. Nama Anak Keempat : Muthia Azzahra Sibuea
12. Alamat Sekarang : Jalan Gelora Nomor 1 Teladan Barat Medan
13. Nomor Telepon / HP : 061-7341909 / 08126588264

14. Email : mhd.buhari@umsu.ac.id dan
sibuea65@gmail.com
15. Kode Pos : 20217

II. Riwayat Pendidikan

Periode (Tahun)	Sekolah / Universitas	Jurusan / Program Studi	Keterangan
1971 - 1977	SD Negeri 3 Tanah Lapang Porsea	-	
1977 - 1981	SMP Negeri 1 Siraituruk Porsea	-	
1981-1984	SMA Negeri Porsea Kabupaten Tapanuli Utara	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Melanjut ke USU melalui Jalur Tanpa Tes PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan}
1984 - 1990	Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU)	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (SEP)	Masuk PNS Dosen DPK melalui Jalur Beasiswa TID (Tunjangan Ikatan Dinas) Tahun 1992
1994 - 1998	Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU)	Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Daerah dan Pedesaan (PWD)	Program Beasiswa TMPD (Tim Manajerial Program Doktor) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta
2007 - 2011	Institute of Graduate Studies University of Malaya Kuala Lumpur	Human Development Research	

III. Riwayat Pengalaman Kerja

Periode / Tahun	Instansi / Lembaga	Posisi / Fungsional
1985 - 1995	Bimbingan Tes "MEDICA" Medan	Instruktur/Tentor dan Kepala Bagian Kimia
1986 - 1996	Bimbingan Tes "ALUMNI MAN-1"	Koordinator Pendidikan
1987-1989	Bimbingan Tes "Ukhuwah Islamiyah" Fakultas Pertanian USU Medan	Pimpinan / Koordinator Pendidikan
1998 - 1999	Konsultan Pendamping Program Nasional Gerakan Mandiri Padi-Kedelai-Jagung (Gema Palagung) di Kabupaten Simalungun	Koordinator Kabupaten Simalungun
2002 – 2004	Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara	Anggota
2004 – 2015	Yayasan Pendidikan "NURUL IMAN" Tanjung Morawa (MIS – MTs – SMA) Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	"Direktur Pendidikan Madrasah-Sekolah"
2008 – 2012	Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian	Ketua Program Studi
2012 – 2016	Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jurusan Agribisnis	Ketua Program Studi
2018 - 2024	Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Program Studi Magister Agribisnis	Ketua Program Studi
2014 - sekarang	Program Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area (UMA)	Staf Pengajar
2021 – sekarang	Program Doktor Ilmu Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area (UMA)	Staf Pengajar
2015 – sekarang	Program Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU)	Staf Pengajar

2013 - 2016	Tim Ahli / Konsultan Penelitian Bank Indonesia Wilayah I Medan dan Wilayah II Sibolga	Team Leader / Konsultan
1992 - sekarang	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara	Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPK
1997 – 2000	Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Pembantu Dekan III
2001 – 2005	Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Dekan
2006 – 2010	Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Dekan
2015 - sekarang	Tim Panitia Penilai Angka Kredit (PPAK) Universitas Muhammadiyah Sumatera	Sebagai Sekretaris

IV. Riwayat Pengalaman Organisasi Muhammadiyah

Periode / Tahun	Instansi / Lembaga	Posisi / Fungsional
1999 – 2003	Pengurus Ranting Muhammadiyah Pasar Merah Timur	Ketua
2003 – 2005	Pengurus Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasar Merah	Ketua
2006 - 2009	Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Medan	Anggota

V. Riwayat Pegaaman Organisasi di Luar Muhammadiyah

Periode / Tahun	Instansi / Lembaga	Posisi / Fungsional
1986 -1992	Remaja Masjid Raya Al Ikhlas Perumnas Simalingkar Medan	Ketua Umum
1990 - 1993	Majelis Dakwah Islamiyah Kecamatan Medan Tuntungan	Ketua Umum

1988-1990	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara	Ketua Umum
1987 – 1989	Lembaga Pertanian Islam HMI Cabang Medan	Ketua
1991 – 1995	Ikatan Pemuda Islam Tapanuli Utara (IPITRA) se-Indonesia	Ketua Umum
2000 – 2015	Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam (PBI) se-Indonesia	Wakil Sekretaris
2012 - sekarang	Badan Kenadziran Masjid Jami' Teladan Barat Medan Kota	Ketua/Nadzir
2017 - 2021	Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi Sumatera Utara	Direktur Lembaga Agribisnis dan Agroindustri
2017 – 2019	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Medan Kota	Ketua

VI. Pengalaman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendaanaan
1	2021	Pengembangan Model Lembaga Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Meningkatkan Kinerja dan Pendapatan Masyarakat Desa di Kawasan Hutan Mangrove	PTUPT Internal UMSU
2	2019	PPDM (Program Pengembangngn Desa Mitra) : Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa di Kawasan Hutan Mangrove	PPDM Internal UMSU
3	2018	Pemodelan Lembaga Koperasi Unit Desa dalam Pengembangan Ekonomi Desa	Penelitian Dasar Internal UMSU
4	2017	Penelitian Pola Konsumsi Cabai Merah dan Ketahanan Pasokan Komoditas Cabai Merah di Kota Sibolga dan Sekitarnya	Kerjasama Penelitian dengan Bank Indonesia Sibolga

5	2016	Pemodelan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Langkat	Hibah Penelitian Fundamental DRPM
6	2015	Penelitian Pola Pembiayaan (Lending Model) Usaha Budidaya Bawang Merah	Kerjasama Penelitian dengan KPw Bank Indonesia Sibolga
7	2015	Survei Kegiatan Dunia Usaha di Medan Provinsi Sumatera Utara	Kerjasama Penelitian dengan Bank Indonesia Sumatera Utara
8	2014	Penelitian Tentang Pengembangan Model Koperasi di Kabupaten Langkat dalam Peningkatan Ekonomi Daerah	Hibah Bersaing - DRPM
9	2014	Quick Survey Perkiraan Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Perekonomian Sumatera Utara	Kerjasama Penelitian dengan Bank Indonesia Sumatera Utara
10	2014	Penelitian Tentang Pembiayaan (Lending Model) Usaha Tenun Sipirok : Pola Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Usaha Kerajinan Tenun Sipirok	Kerjasama Penelitian dengan Bank Indonesia Sibolga
11	2014	Quick Survei Tentang Analisis Dampak Rencana Kenaikan BBM Terhadap Perekonomian Sumatera Utara	Kerjasama Penelitian dengan Bank Indonesia Medan
12	2013	Pelitiaan Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM)	Kerjasama Penelitian Bank Indonesia Sumatera Utara dengan LPPM IPB Bogor
12	2010	Kajian Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	Kerjasama Penelitian dengan Kantor Balitbang Daerah Kota Medan

14	2009	Kontribusi Koperasi Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Langkat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
15	2007	Penelitian Atas Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Sumatera Utara di Tiga Pintu Masuk	Kerjasama Penelitian dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Utara

VII. Publikasi Artikel Ilmiah dan Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol./No./Tahun
1	Kajian Sosial Tentang Perkembangan Masyarakat Desa	Madani	Vol. 4 Nomor 2 Edisi Juni 2003
2	Perencanaan Wilayah Pesisir dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi	Madani	Vol. 6 Nomor 2 Edisi Juni 2005
3	Sumbangan Koperasi Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Langkat	Man and Society University of Malaya	Vol. 14 Tahun 2004 - 2005
4	Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Ketahanan Pangan (Penulis Tunggal)	Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Stakeholders dalam Rangka Pemanapan Ketahanan Pangan	Maret 2006
5	Pendidikan Tinggi Indonesia dan Globalisasi	"Akademia"	Vol. 10 Nomor 1 Edisi April 2006
6	Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Peningkatan Pendapatan Petani	Sosial dan Ekonomi Pertanian	Volume 3 Nomor 1 Edisi Februari 2011

7	Analisis Peranan Koperasi dalam Kegiatan Usaha Tani di Kabupaten Langkat	Sosial dan Ekonomi Pertanian	Volume 8 Nomor 1 Edisi Februari 2011
8	Prospek Agribisnis Kopi Gayo	Sosial dan Ekonomi Pertanian	Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2011
9	Analisis Komparatif Pendapatan Peternak Bermitra dengan Peternak Mandiri di Kabupaten Deli Serdang	Sosial dan Ekonomi Pertanian	Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2011
10	Peran Akademisi untuk Penguatan Akses Pangan Masyarakat dalam Rangka Revitalisasi Agribisnis	“Akademia” Kopertis Wilayah I NAD – Sumut	Februari 2012
11	Analisis Pelayanan Koperasi Unit Desa Terhadap Petani Anggota di Kabupaten Simalungun	Jurnal Pertanian Kopertis Wilayah I	Volume 10 Nomor 1 April 2012
12	Analisis Usaha Tani dan Pemasaran Asam Gelugur di Kab. Deli Serdang	Agrium	Oktober 2012
13	Analisa Kelayakan Usaha Tani Jambu Air King Rose Apple di Kabupaten Tanah Karo	Agrium	Volume 11 Nomor 3 edisi Oktober 2013
14	Analisa Kelayakan Usaha Tani Jambu Air King Rose apple di Tanah Karo	Agrium	Vol 11. Nomor 3. Oktober 2013
15	Kajian Efisiensi Pemasaran Jambu Air King Rose Apple	Agrium	Vol 18. Nomor 2. Oktober 2013.
16	Analisis Kontribusi Usaha Ternak Sapi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Simalungun	Sosial dan Ekonomi Pertanian	Vol 11. Nomor 1.

			Februari 2014.
17	Pengaruh Status Penguasaan Lahan Sawah dan Sarana Produksi Terhadap Pendapatan Usahatani Padi	Sosial dan Ekonomi Pertanian	Vol 11. Nomor 2. Agustus 2014.
18	Analysis of Factor Cause Reduction Rice Farmers in Central District Tapanuli	Agrium	Nomor 1 April 2016
19	Analisis Dampak Penerapan Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Sawah di Nias Selatan	Ceres	Nomor 1 April 2016
20	Prospek Agribisnis Kopi Gayo	Akademia	Nomor 3 Edisi Juli 2016
21	Analisa Ekonomi Usaha Ternak Itik Pedaging di Kabupaten Langkat	Jurnal Riset Agribisnis dan Peternakan	Nomor 1 Desember 2016
22	Analysis of The Business Economics of Ducklings in Langkat Regency	Journal of Agribusiness Sciences	01/01/Oktober 2017
23	A comparative Analysis of Economic Farming Activity of Farmers Rice-Livestock Integrated Farming System (RLIFS) and non RLIFS	International Journal of Engineering and Technology	7 (3.2) (2018) 792 - 795
24	Contribution of Village Cooperation Unit in Improving Farmers Incomes	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	122 (2018) 102021
25	Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara	Agrica	Juli 2016
26	Modeling of Cooperation to Improve Rural Economic in Langkat	International Journal of Business, Economics and Law	April 2016

27	Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kab. Labuhan Batu Selatan	Prosiding Lokakarya dan Seminar Mencari Model Pemberdayaan dan Peremajaan Perkebunan	27-28 Mei 2016
28	Peranan Koperasi Dalam Kegiatan Usaha Tani di Kab. Langkat	Proceeding of International Conference on Multi disciplinary Reserach	'2016
29	Market Efficiency and Integration Analysis of Organic Vegetables in Medan	Proceeding International Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources	23 Mei 2017
30	The Contribution of Agricultural Sector Oneconomic District / Cities in North Sumatera Province	Proceeding International Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources	'23 Mei 2017
31	Analisis Komparasi Produksi dan Pendapatan Petani Peserta dengan Petani Bukan Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan	Jurnal Ilmu Pertanian AGRIMUM	'Oktober 2017
32	Development Strategy Business of Sipirok Weaving Handicrafts	Proceeding The Annual International Conference 2017 Syiah Kuala University	'18-20 Oktober 2017
33	Contribution of Village Cooperation Unit in Improving Farmers Incomes	Journal of International Conference on Agriculture,	'2018

		Environment and Food Security	
34	Effectiveness of Auction Markets Commodities Red Pepper (<i>Capsicum Annum L.</i>)	Proceeding International Conference Sustainable Agriculture and Natural Resources Management	2018
35	Effectiveness Analysis of Saving and Loan Activities of Islamic Cooperation in Deli Serdang	Proceeding of International Conference on Multi disciplinary Reserach	'5-6 September 2018
36	The Effectiveness of Auction Market for Red Chili in North Tapanuli Regency, Indonesia	International Journal of Research and Review	'Juni 2019
37	Is Business Friendliness Enhancing Energy Consumption In The ASEAN Region?	Journal of Security and Sustainability Issues	'Mei 2020
38	Strategi Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Agribisnis Perkebunan	Journal of Agribusiness Sciences	'April 2020
39	The Effect of Social Economic Factors on Ability to Save of Farmers: The Role of Income Supply, Education Supply, Experience, Age, Land Area Distribution, Piece, Consumption and Family (First Author).	International Journal Supply Chain Management	Vol. 9, No. 3, June 2020
40	The Impact of Renewable Energy and Economic Development on Environmental Quality of ASEAN Countries	AgBioForum International Journal	23(1): 12-21. ©2021

VIII. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Internasional I Pembangunan Indonesia di Kuala Lumpur	Peranan Koperasi Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Sumatera Utara	29-30 Maret 2004 di Tun Ahmad Zaidi College University of Malaya
2	Seminar Internasional II Pembangunan Indonesia di Kuala Lumpur	Koperasi Unit Desa dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Langkat	29 Januari 2005 di Perdana Siswa Hall University of Malaya
3	Seminar Nasional Pemberdayaan Stakeholders dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan	Diversifikasi Konsumsi Pangan dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional	28 Maret 2006 Kopertis Wilayah I Medan
4	Seminar Regional Se-Sumatera Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa SEP Indonesia (POPMASEPI)	Pemberdayaan Koperasi dalam Rangka Pembangunan Pertanian	26-29 Juni 2007 di Gedung Testak PTP Nusantara II Medan
5	Lokakarya Antar Instansi dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut	Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	19 Desember 2008 di Dharma Deli Hotel Medan
6	Workshop Internasional “ Wakaf Dalam Berbagai Perspektif” Kerjasama UMSU Universiti Sains Malaysia	Wakaf dalam Persepektif Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	8 Mei 2009 di Auditorium UMSU Medan

7	Worksho Revitalisasi Agribisnis dalam Mewujudkan Akses Pangan	Peranan Akademisi untuk Penguatan Akses Pangan Masyarakat dalam Bangsa Revitalisasi Agribisnis	12 Desember 2011 di Asean Hotel International Medan
8	Seminar Internasional Kerjasama USM Malaysia dengan UMSU	Pembangunan Pertanian dalam Perspektif Islam	24 Agustus 2012 di Hotel Madani Medan
9	Seminar Internasional Kerjasama UMA dengan ISBEV USM Penang	Pertanian dan Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam	12 September 2013 di Hotel Madani Medan
10	Seminar Hasil Penelitian Lending Model Tenun Sipirok kerjasama dengan Bank Indonesia	Pembiayaan (lending model) Usaha Tenun Sipirok	9 Oktober 2014 di Padang Sidempuan
11	Workshop dengan Jajaran SKPD Pemkab Dairi dan Pakpak Barat kerjasama dengan BI Medan	Penelitian tentang Komoditas, Produk dan Jasa Unggulan di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat	13 dan 14 November 2014 di Kutacane dan Pakpak Bharat
12	Seminar Internasional Kerjasama USM Malaysia dengan UMSU	Pembangunan Pertanian dalam Perspektif Islam	24 Agustus 2012 di Hotel Madani Medan
13	Seminar Internasional Kerjasama UMA dengan ISBEV USM Penang	Pertanian dan Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam	12 September 2013 di Hotel Madani Medan
14	Seminar Hasil Penelitian Lending Model Tenun Sipirok kerjasama dengan Bank Indonesia	Pembiayaan (lending model) Usaha Tenun Sipirok	9 Oktober 2014 di Padang Sidempuan

15	Workshop dengan Jaringan SKPD Pemkab Dairi dan Pakpak Barat kerjasama dengan BI Medan	Penelitian tentang Komoditas, Produk dan Jasa Unggulan di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat	13 dan 14 November 2014 di Kutacane dan Pakpak Bharat
16	Seminar Nasional Pertanian dan Peternakan Terpadu	Analisa Ekonomi Usaha Ternak Itik Pedaging di Kabupaten Langkat	12 Maret 2016 di Fakultas Pertanian UM Jawa Tengah.
17	Seminar Nasional Pertanian dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian	Analisis Penyebab Kemiskinan Petani Padi Sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah	9 dan 10 April 2016 Fakultas Pertanian Universitas Al Muslim
18	International Conference Agribusiness Development for Human Welfare; Small and Medium-sized Enterprises Competitiveness.	Modeling of Cooperation to Improve Rural Economic in Langkat	14 dan 15 Mei 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
19	Workshop Antar Bangsa Pembangunan Berteraskan Islam (International Workshop on Islamic Development)	Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan Perkebunan Swasta Asing	16 Mei 2016 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
20	Lokakarya/Seminar Nasional "Mencari Model Pemberdayaan dan Peremajaan Perkebunan untuk Sawit Indonesia yang Berkelanjutan	Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan	27 dan 28 Mei 2016 di Hotel Polonia Medan.

21	International Conference on Multidisciplinary Research.	Peranan Koperasi dalam Kegiatan Usaha Tani di Kabupaten Langkat	6 dan 7 September 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar
22	International Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources Managements	Market Efficiency and Integration Analysis of Organic Vegetables in Medan	23 Mei 2017 di Hotel Grand Jamee Medan
23	Seminar International The 18th Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting	The effect of the socioeconomics factor against ability to save for farmers in district Deli Serdang	IPB Bogor 4 – 5 October 2017
24	Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Sosial Ekonomi Pertanian	Penerapan Good Corporate Governance Di Perusahaan Perkebunan Swasta Asing	UGM Yogyakarta 29 Juli 2017
25	International Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources Management	Market Efficiency and Integration Analysis of Organic Vegetables in Medan	UMSU Medan, 23 May 2017
26	International Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources Management	Effectiveness of Auction Markets Commodities Red Pepper (<i>Capsicum annum L.</i>)	Medan, 28-29 August 2018
27	The 7th International Conference on Multidisciplinary Research	Effectiveness Analysis of Savings and Loan Activities of Islamic	Medan, 5-6 September 2018

		Cooperation in Deli Serdang	
28	1st International Conference Business, Agribusiness, & Agriculture	Development Models of Agribusiness Based Economic Institution to Improve the Community Performance and Income in Mngrove Forest Area	Medan, 11-12 November 2021

IX. Karya Buku

No.	Judul Buku	Penerbit
1	Book Chapter, COVID 19 & KAMPUS MERDEKA di Era New Normal; Sumber Daya Manusia dan Pertanian Menghadapi Era Globalisasi dan Pandemi Covid-19	UMSU Press tahun 2020

X. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Dosen Teladan I Tingkat Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Sumatera Utara Aceh	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	1997
2	Pemakalah Terbaik I pada Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM Yogyakarta	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta	2017

Medan, 5 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, wavy strokes that resemble the letters 'M' and 'B', followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah robbal 'alamin...asyhadu an-laa ilaaha Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasululullah... Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa zurriyatih ajma'in....

Segala puja puji dan syukur hanya Allah Swt., yang pantas menerimanya. Demikian pula saya sebagai hamba yang dhaif menyampaikan syukur Alhamdulillah atas nikmat, karunia dan amanah bahkan ujian yang telah diberikan berupa pencapaian jabatan fungsional sebagai Profesor atau Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sungguh pencapaian yang tak pernah terlintas sama sekali dalam benak dan fikiran (apalagi episode pengusulan jabatan professor ini telah saya mulai sejak tahun 2013...), betapa anak dari huta Porsea sampai kepada jenjang terhormat seperti ini, tentunya hanya karena izin dan ridho Allah Swt.

Pada kesempatan yang sakral dan berbahagia ini, izinkanlah saya dengan segala kerendahan hati dan diri yang penuh kekurangan dan khilaf menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua orang atau pihak yang telah berjasa memberikan pengajaran, pembimbingan, dukungan moril dan spirituil, doa yang tak pernah putus sehingga saya dapat mencapai jenjang Jabatan Guru Besar, teristimewa saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pemerintah Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada

saya. Terimakasih yang tulus kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Direktur Pengembangan Karir Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungannya dalam pengusulan jabatan Guru Besar.

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (LLDIKTI-I) bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, M.Si. dan seluruh jajarannya yang telah sangat membantu perjalanan proses administrasi pengajuan berkas ke Jakarta. Tak terlupakan kebaikan dan inisiasi luar biasa dari Bapak Prof. Dr. Dian Armanto, M.Pd. atas bantuan dan supportnya, Bapak Azhar, SH, MH dan adinda Doddy Simanjuntak, SE, MSi. serta sahabat-sahabat pegawai staf Kantor LLDikti Wilayah I Medan.
3. Ketua Senat sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., beserta anggota Senat dan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor yang telah menghantarkan dan memberi kesempatan kepada saya untuk memperoleh kehormatan berdiri di mimbar mulia ini. Ucapan terimakasih yang tulus kepada Tim PPAK beserta jajarannya dan adminstratur yang luar biasa Musdalifah, S.Sos. dan kawan-kawan yang telah membantu dalam menyelesaikan berkas pengusulan guru besar, rekan sejawat tim PPAK saudariku Prof. Dr. Ir. Nurhayati, MP yang senantiasa memberikan masukan, informasi dan solusi sangat berharga.
4. Kepada pejabat-pejabat Rektor UMSU lintas masa dan sejarah yang telah menerima kehadiran saya sebagai dosen tetap di sini. Kepada almarhum dr. H. Dalmy Iskandar, almarhum Drs. H. Chairuman Pasaribu, Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM; Drs. H. Dalail Ahmad, MA dan Prof. Dr. Agussani, M.AP., semoga

Allah Swt., memberikan balasan berlipat ganda atas kebaikan dan jasa-jasa pengabdian mereka, semoga UMUSU semakin unggul, cerdas dan terpercaya. Amin...

5. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajarannya, atas segala kebaikan, kemudahan dan bantuan yang diberikan selama proses pengusulan. Ucapan terimakasih kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas dukungan dan bantuannya yang luar biasa. Demikian pula halnya dengan rekan-rekan dosen senior dan junior yang begitu total memberikan dukungan dan doa untuk pengajuan Guru Besar ini. Semoga program studi kita nantinya mampu menaik ke jenjang akreditasi “unggul”.
6. Teman-teman dari sivitas akademika di mana saya dapat mencurahkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki selain di *homebase* saya di UMUSU yaitu di Fakultas Pertanian dan Magister Agribisnis UISU Medan, Program Magister Agribisnis dan Doktor UMA, Program Magister Agribisnis USU yang senantiasa memberikan dukungan moril dan bantuan informasi terkait dengan progres dan proses pengajuan jabatan Guru Besar.
7. Yang Berbahagia Profesor Dr Pazim @Fadzim Othman selaku promotor saya di University of Malaya demikian pula Profesor Dr Dato Razali Augus dan Profesor Dr Mohammad Rosli dari UM Kelantan sebagai penyelia dan penguji saya yang begitu tulus mengarahkan dan menyemangati dalam penyusunan dan pemeriksaan disertasi. Semoga Allah memberikan ridha dan kebaikan kepada guru-guru saya tersebut.

8. Tak terlupakan nasehat dan arahan abangda senior Profesor Dato Dr Djohar Arifin Husin atas jasa beliau menghantarkan saya menginjakkan kaki di University of Malaya. Sahabat terbaik saya abangda Prof. Dr. Ir. Muhammad Asaad, M.Si. (mantan Rektor UISU) yang sekarang berjaya mendirikan Perguruan Tinggi Universitas Deli Sumatera yang selalu mengingatkan saya di sela-sela kesibukan. *Begitu panjang episode perjalanan dan perjuangan itu yaa abangda...* Terimakasih tak terhingga kepada al ustadz saudaraku adinda Dr. Abdi Syahril Harahap, Lc., dan Dr. Ir. Meriksa Sembiring, Laeku Robert Tua Siregar, S.E., Ph.D. dan Dato Yuris Danilwan, SE, MSi, Ph.D. Murid kesayangan Khayamuddin Panjaitan, SP, M.Sc., dan rekan-rekan terbaik dari UPM Selangor yang selalu mengelu-elukan kedatangan di Kuala Lumpur.
9. Guru terbaik saya ketika menyelesaikan pendidikan Magister Sains di Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. S. Hadibroto, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. Zulkifil Lubis, M.App.Sc. serta Iskandar Syarif, SE, MSi. yang telah membimbing dan menghantarkan saya saya merah gelar Magister Sains bidang Perencanaan Wilayah Daerah dan Perdesaan.
10. Bapak Prof. Dr. Ir. S. B. Simanjuntak, MA guru pembimbing saya ketika menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu terbaik dan kiat-kiat bekerja sama kepada saya.
11. Semua guru-guru saya baik formal maupun non formal mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan tingkat paling tinggi yang telah mendedikasikan ilmu, pengajaran, kebaikan kepada saya. Terimakasih atas jasa-jasa yang luar biasa dari Bapak dan Ibu sekalian yang telah menanamkan kepada saya nilai-nilai jihad

kebaikan dan jihad kebenaran yang hakiki sebagai modal yang terkuat dalam mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu yang telah diberikan kepada saya di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.

12. Terkhusus kepada guru lapangan saya kepada bang dr. Thomas Silangit (BT-BS Medica) yang telah menjadi “inspire model” dan warna bagi saya dalam membimbing dan mendidik. Abang-abang dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Islam sebagai ajang perkaderan manajemen terbaik yang pernah dilalui. Saudaraku para mujahid masjid di Badan Kenadziran Masjid Jami’ Teladan Barat Medan yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya. Teristimewa Sahabat Mujahid di “Sekolah-Madrasah Nurul Iman” yang tak pernah terlupakan sebagai tempat beramal-berbudiah-berukhuwah dengan penuh suka dan duka untuk menggapai mardhatillah... *barakallahu fii kum.*
13. Kedua orang tua saya, ibunda Hajjah Siti Aisyah Sitompul (almarhumah) dan ayahanda Haji Arifin Sibuea (almarhum) yang telah membesarkan dan mendidik saya di sebuah keluarga yang keras dan tegas dalam menanamkan cinta dan kasih sayang yang tulus dalam bingkai Islam yang *kaffah*. Nasehat dan petuah dari Omak dan Bapa selalu teringat dan tetap terkenang sepanjang masa. Tentu semua yang saya dapatkan sampai saat ini adalah berkat buah kasih sayang dan perjuangan mereka. Ya Allah ampunkan dan sayangilah kedua orang tua hamba, tempatkan mereka di surga *jannatul Firdaus*. Amiiiiin. Demikian pula halnya dengan kebaikan dan kasih sayang yang saya dapatkan dari ibunda Hajjah Roslinawaty Siregar. Semoga Allah memberikan tempat terindah kepadanya di surga *jannatul firdaus*. Selamat jalan ibu!

14. Yang tercinta saudara-saudara kandung saya: abangku Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd; abangku Drs. Hasan Maksum Sibuea (*almarhum*); *ibotoku na burju* Dra. Hj. Nurhalimah Sibuea, M.Pd.; *ibotoku na burju* Dra. Hj. Siti Syarifah Sibuea; *ibotoku na burju* Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si, *ibotoku na burju* Dra. Nur 'asyiah Sibuea (*almarhumah*); *anggi* dr. Awaluddin Sibuea, Sp.B; dan *ibotoku na burju* Nur 'Ainun Sibuea, M.Pd. beserta keluarga dan anak-anak dan keponakan tersayang yang terus-menerus memberikan bantuan, pertolongan dan doa untuk keberhasilan, keberkahan dan kekompakan keluarga besar kita...*keluarga Sibuea par Tano Lapang*.
15. Yang mulia Ibunda mertua saya Hajjah Chairani Amiraden Siregar yang sampai detik ini tetap setia untuk selalu memperhatikan dan menyaksikan serta merestui semua ikhtiar yang saya lakukan sehari-hari, terutama dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan ke arah lebih baik, *sehat selalu ya Emak*. Demikian pula kepada ayahanda mertua saya Haji Ahmad Bastian Badrys (*almarhum*) yang telah begitu berkesan menasehati, mensupport dan menyemangati saya supaya kukuh menjadi seorang dosen PNS terbaik. *Terimakasih Mama!*
16. Yang tercinta kakak dan adik ipar saya : Ir. Chairu Fariandini Bastian; Ir. Dino Tri Utomo Bastian; Ir. Titin Dimayanti Bastian, MM; Hajjah Dira Chayanti Bastian; Dian Prabudi Bastian, ST; Derry Pratiwy Annisa Bastian, SE. beserta keluarga dan anak-anak keponakan tersayang, terimakasih atas dan doa dan dukungannya. Semoga keluarga besar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.
17. Terimakasih tak terhingga kepada istriku tercinta Hajjah Dina Andika Bastian yang telah bersama-sama sejak tahun 1993 yang selalu setia mendampingi, baik

dalam keadaan suka dan duka. Sosok yang luar biasa telah memberikan pengajaran hidup kepada saya bagaimana bersikap tenang dan sabar, rendah hati dan *tawadu* dalam menghadapi setiap aktifitas hidup dan kehidupan. Sungguh "*kolaborasi harmonis kombinasi kehidupan Jawa dan Batak*" yang sedemikian rupa telah menjadi anugerah terbaik dan terindah dari Allah Swt., kepada saya pribadi. Semoga Allah mengkekalkan kita di dunia sampai dengan akhirat di surga *jannatul firdausy* nantinya kelak. Amiiin.

18. Anak-anaku tersayang : Faiz Ahmad Sibuea, SP, MSi; Anisah Muthmainnah Sibuea, SKG; Teguh Imani Sibuea dan Muthia Azzahra Sibuea, atas segala perhatian, kasih sayang dan doa kalian kepada ayah demi kebahagiaan keluarga kita. Demikian pula keponakanku tersayang Hotnida Silitonga, S.Pd. Terimakasih atas doa, bantuan dan dukungan selama ini. Semoga Allah menjadikan keluarga kita *sakinah mawaddah wa rahmah*. Amin.
19. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak saya sebutkan satu persatu, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, dukungan, bantuan dan semangat sehingga hari ini saya bisa berdiri di forum mulai ini.
20. Kepada para undangan dan tamu yang hadir dan berkenan mendengarkan pidato pengukuhan ini, saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Swt., membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian dengan berlipat ganda. Akhirul kalam semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kemaslahatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin yaa Rabbil Alamin.

Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil 'alamin
saya akhiri orasi ilmiah ini.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh...

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si.